

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang terletak di Semenanjung Selatan Sulawesi. Wilayah ini memiliki kondisi geografi yang beragam, yang mencakup pegunungan, dataran rendah, dan pantai.¹ Sulawesi Selatan sendiri terdiri atas berbagai potensi dan keanekaragaman dan etnik yang beragam sehingga menjadikannya salah satu wilayah yang sarat dengan adat istiadat dan kebudayaan orang Sulawesi Selatan. Pelras membagi masyarakat Sulawesi Selatan kedalam empat kategori etnik yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja.²

Keberagaman etnik di Sulawesi Selatan mempengaruhi setiap budaya yang terbentuk di setiap etnik, salah satunya pada tradisi perkawinan/pernikahannya yang beragam. Keragaman budaya perkawinan tersebut masih bisa disaksikan hingga saat ini, namun secara perlahan-lahan berbagai pergeseran telah terjadi pada tradisi (adat) yang ada pada masyarakat di Sulawesi Selatan. Salah satu yang terus berubah pada perkawinan masyarakat Sulawesi Selatan adalah tradisi berbusana dan tata riasnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karena modernisasi. Pakaian yang awalnya berfungsi sebagai pelindung tubuh kemudian



Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. "Provinsi Sulawesi Selatan hingga 2021". (2021)

Christian Pelras. *Manusia Bugis* (Makassar: Penerbit Innawa, 2021), 20.

menjadi penanda sosial dan berkembang juga memiliki fungsi sebagai ekspresi budaya manusia.³

Penggunaan pakaian dalam kehidupan mulai bergeser dari hanya untuk mencega serangan atau gangguan dari luar atau penutup tubuh menjadi alat memperlihatkan kekuasaan dan wibawa seseorang. Pakaian juga berperan besar dalam menentukan citra seseorang. Begitu juga pada masyarakat Sulawesi Selatan pakaian merupakan media bagi masyarakat untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat.⁴ Lebih dari itu, pakaian adalah cermin dari identitas, status, hierarki, gender, memiliki nilai simbolik, dan merupakan ekspresi cara hidup tertentu. Pakaian juga mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan sosial, politik, dan religius dengan kata lain pakaian adalah kulit sosial.⁵ Dengan demikian posisi atau status sosial seseorang dapat dilihat dari tata busananya.

Selain tata busana, tata rias yang dipakai seseorang juga menunjukkan status orang tersebut. Tata busana dan tata rias khususnya pada acara perkawinan tumbuh saling beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap daerah memiliki ciri khas tata rias yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Secara umum, tata rias berfungsi menampilkan keindahan dan kecantikan secara wajar dan tidak

³ Dian Fatihatur Rohmah, “Fenomena luntarnya Tradisi Jawa dalam Bidang Fashion Akibat Modernisasi”, (*Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2011), 70

Susan Bolyard Millar. *Perkawinan Bugis*. (Makassar: Penerbit Ininnawa, 15-108.

Ienk Schulte Nordholt, *Outward Appearances: Trend, Identitas, gan* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 16.



berlebihan.⁶ Fungsi tata rias adalah membantu mempertebal, mempertajam, serta memperjelas garis-garis muka atau bahkan sebaliknya, mempertipis dan memperluas garis-garis muka yang akan ditutupi atau dihilangkan. Fungsi tata rias dapat dikatakan sebagai koreksi wajah, dengan menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan (kecantikan). Motif atau tujuan orang berias yaitu untuk mengubah *performance* atau penampilan agar tetap cantik. Oleh disebabkan tujuan estetis yang diutamakan, sehingga ikatan terhadap norma-norma hukum adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat kadang dilangkahi.⁷

Pada tahun 1930-an pengaruh modernisasi sudah sangat meluas di Sulawesi Selatan dan hampir mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk busana dan rias yang digunakan. Perubahan tersebut dapat terlihat pada masa kerajaan-kerajaan lokal dengan konsepsi *Kedatuan To Manurung* yang terdapat dalam *Lagaligo* itu, kaum laki-laki pada umumnya tidak memakai baju tetapi mengenakan selempang bahu (*salempang*), gelang (*lola*) di lengan atas dan pergelangan tangan, serta kalung keemasan.⁸ Namun pengantin Makassar pada tahun 1930-an sudah memakai baju, mereka juga memakai ikat kepala (*sigera'* atau *pa'sigera'*, dan *jalapinra*) yang terbuat dari semacam sabuk tipis panjang berpilin. Baju (waju) yang dikenakan perempuan bangsawan pada masa itu telah berupa baju longgar lengan pendek atau *waju ponco'* atau *baju bodo*. Selain gelang kaki, kalung, gelang di lengan atas dan pergelangan tangan (*kalaru kati*), perempuan bangsawan juga mengenakan sebuah



⁶ Sagayoga, *Tata Kecantikan Kulit I*. (Jakarta: Pt Vika Pres, 1984), 35.

⁷ Sumiani, "Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar", *eni Budaya "Pakarena"*, 2016), 5.

⁸ Sumiani, "Simbol dan Makna Tata Rias", 91.

selendang (*pa'sapu*) yang diselempangkan di atas bahu yang di sudutnya dijahitkan hiasan emas. Mereka tidak memakai penutup kepala, tetapi menyematkan kembang goyang dan sisir sebagai perhiasan di rambutnya.⁹

Pengantin di Wajo tahun 1930 sudah menggunakan dasi.¹⁰ Pada tahun 1938 pengantin laki-laki Toraja justru sudah menggunakan setelan jas dengan celana dan dilengkapi dengan sepatu tetapi berbanding terbalik dengan pengantin perempuan yang hanya menggunakan baju lengan pendek (*bayu pokko*) dan sarung (*sambu'*) tanpa aksesoris.¹¹ Di kasus pernikahan lain di Makassar tahun 1937 pengantin laki-laki telah menggunakan setelan jas berwarna hitam dilengkapi dengan sepatu sedangkan pengantin perempuan menggunakan gaun.¹² Pada tahun 1952 pengantin laki-laki di Makassar menggunakan setelan jas berwarna hitam dan menggunakan peci berwarna hitam dilengkapi dengan dasi dan kemeja berkerah warna putih pengantin perempuan menggunakan gaun berwarna putih.¹³

Selama beberapa tahun perkembangan penggunaan pakaian, aturan-aturan, dan standar sosial masyarakat mempengaruhi pemilihan masyarakat dalam penggunaan busana dan tata rias di upacara pernikahan mereka. Hingga pada tahun 1990-an pengantin kembali menggunakan pakaian tradisional mereka atau *baju bodo* dan *jas tutup* berwarna hijau dengan motif sarung yang sudah berkembang

⁹ Pernikahan Adat Makassar Tahun 1930.

¹⁰ Foto Pernikahan di Wajo tahun 1930.

¹¹ Foto Pernikahan di Toraja 1938.

Foto Pernikahan Pasangan dari Ambon Luhukay-Haurissa di Kota tahun 1937.

Foto Pernikahan H.A Bau Parenrengi dengan St. Hanafi Daeng Kati 31 r 1952.



untuk masyarakat Bugis. Namun, dapat kita lihat pada pengantin tahun 1996 di Wajo menggunakan pakaian tradisional dengan warna dan motif yang sama antara kedua pengantin.¹⁴

Perubahan-perubahan tersebut menandakan bahwa sepanjang tahun 1930 an sampai 1998 perkembangan terus terjadi pada tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan mengkaji bagaimana perkembangan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan dan mengapa perubahan terus terjadi pada tata busana dan tata riasnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan pada masa sebelum kemerdekaan 1930-1945 dan masa setelah kemerdekaan tahun 1945-1998.
2. Mengapa terjadi perubahan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan dari tahun 1930-1998

1.3. Batasan Masalah

Penulisan Sejarah sangat diperlukan adanya batasan agar pembahasan bisa berfokus pada batasan yang telah ditentukan, bahwa tulisan mencapai inti pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Batasan masalah dalam penelitian sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial menetapkan ruang geografis tertentu

menjadi fokus, sedangkan batasan temporal menentukan rentang waktu

Foto Pernikahan H. Muh. Assar dan Hj. Besse Illang di Wajo tahun 1996.



tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Dengan adanya batasan ini, penulis dapat lebih terfokus pada elemen-elemen yang signifikan dan relevan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan peristiwa yang dibahas dengan lebih mendalam.

a. Batasan Spasial

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan spasial pada wilayah Sulawesi Selatan yang akan difokuskan pada besar di Sulawesi Selatan yakni etnik Makassar, etnik Bugis, etnik Toraja dan etnik Mandar

b. Batasan Temporal

Tahun 1930 dijadikan awal penelitian ini karena tahun 1930 menjadi awal terjadinya gelombang kedua modernisasi dan tahun itu juga menjadi tahun berkembangnya tata rias modern di Indonesia dan berakhir pada tahun 1998, tahun itu berakhirnya pemerintahan Soeharto di Indonesia yang membatasi cara berpakaian masyarakat Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengkaji perkembangan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan sebelum masa kemerdekaan tahun 1930-1945 dan setelah masa kemerdekaan tahun 1945-1998.
- b. Untuk mengkaji faktor penyebab perkembangan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan sesudah kemerdekaan tahun 1930-1998.



1.5. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan dan hingga penyebab tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan terus mengalami perubahan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi dalam penelitian selanjutnya serta memberi kontribusi pada perkembangan penelitian ilmu sejarah.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Yang Relevan

Kajian terkait sejarah tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan sampai saat ini masih terbatas. Namun beberapa kajian yang mengkaji tentang masyarakat dan perkawinan sudah ada yang membahas tentang busananya seperti Susan Bolyard Millar¹⁵ yang berjudul “Perkawinan Bugis”. Tulisan ini membahas secara penuh tentang perkawinan Bugis, bagaimana pesta berjalan megah, ritus-ritus yang mengiringi ritual panjang pernikahan, serta segala perilaku dan bentuk negosiasi antar orang-orang dalam prosesi tersebut. tak lupa menelisik aspek-aspek sosial-politik yang tersirat di baliknya. Di buku ini juga bagaimana suasana rinci tentang ruang, adegan, hingga percakapan. Buku menjelaskan tata ruang aula pesta, ritual, hingga teks undangan pernikahan Bugis yang penuh dengan simbol-simbol



Susan Bolyard Millar. *Perkawinan Bugis*. (Makassar: Penerbit Innawa,

politis yang terjalin di alam pikir orang Bugis. Dia mengamati posisi duduk, cara menempatkan nama dalam teks undangan, orang-orang yang diundang melakukan ritus tertentu dalam serangkaian ritus panjang pernikahan.

Sejarah pakaian secara umum telah dikaji oleh Henk Schulte Nordholt¹⁶ dengan judul “*Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*”. Karya ini membahas mengenai peran dan arti pakaian dalam pergaulan sosial. Mulai membahas mengenai sarung, jubah, dan celana sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran pakaian dalam mengatur kehidupan sosial.

Terdapat pula tulisan-tulisan yang membahas mengenai busana dan tata rias adat beberapa etnik di Sulawesi Selatan di antaranya Sumiani¹⁷ dalam artikelnya yang berjudul ”Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis”. Tulisan ini membahas mengenai kriteria cantik dan indah bagi orang Bugis, klarifikasi rias dan busana orang Bugis, bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan orang Bugis untuk mempercantik, perubahan yang telah terjadi pada tata rias orang Bugis masa kini dan kendala yang dihadapi untuk pengembangan tata rias dan busana Bugis tradisional.

Tulisan ”Busana Adat Pada Masyarakat Sulawesi Selatan” yang ditulis oleh Wiwiek P. Yoesoef.¹⁸ Tulisan tersebut membahas jenis-jenis busana adat dari 4

¹⁶ Henk Schulte Nordholt, *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, (Yogyakarta: LKIS, 2013)

Sumiati, Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis. (*Jurnal Seni ‘Pakarena’*, 2016)

Wiwiek P. Yoesoef, *dkk. Busana Adat Pada Masyarakat di Sulawesi* (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990)



etnik terbesar di Sulawesi Selatan yakni Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar. Tulisan ini menguraikan jenis-jenis pakaian adat yang dipakai oleh masyarakat di berbagai kegiatan seperti pakaian sehari-hari dan pakaian upacara. Selain itu, menjelaskan juga jenis-jenis perhiasan dan kelengkapan busana adat tersebut, bagaimana bahan, proses dan siapa yang membuatnya juga dijelaskan bagaimana fungsi busana, perhiasan dan kelengkapan-kelengkapannya.

Tulisan M. Yamin Sani¹⁹ yang berjudul "Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan" Tulisan tersebut menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok tata rias dan tata busana tradisional pengantin Bugis dan Makassar. Dijelaskan pula bagaimana variasi tata rias pengantin berdasarkan stratifikasi sosial dan bagaimana persiapan juru rias dan calon pengantin sebelum upacara.

Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada yang menulis mengenai perubahan yang terjadi pada tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan. Hal itu yang mendorong penulis untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini akan mengkaji mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada tata busana dan tata rias pengantin di Sulawesi Selatan yang difokuskan pada 3 etnik yakni Makassar, Bugis dan Toraja. Penulis juga berusaha mengkaji apa yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut dalam rentang waktu dari tahun 1930 sampai 1998.



1. Yamin, *dkk, Makna Simbol dan Fungsi Tata Rias Pengantin Pada Suku Bugis di Sulawesi Selatan* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi selatan, 2013)

1.6.2. Landasan Konseptual

Menurut Eleanor Lambert, seorang ahli *fashion* dan penulis mendefinisikan tata busana sebagai seni dalam merancang, membuat, dan mengenakan pakaian. Ia menekankan pentingnya desain estetika dalam menciptakan busana yang tidak hanya fungsional tetapi juga menarik secara visual.²⁰ Menurut Malcom Barnard dalam bukunya “*Fashion as Communication*” menyatakan bahwa tata busana adalah bentuk komunikasi visual yang mencerminkan identitas individu dan budaya. Ia menjelaskan bahwa busana tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat untuk mengekspresikan diri dan status sosial.²¹

Menurut Riyanto busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang.²² Riyanto juga membagi busana ke dalam 3 jenis yakni busana tradisi, busana pesta dan busana sehari-hari. Busana Tradisi adalah busana yang dikenakan untuk acara khusus, memiliki model tersendiri, dan biasanya memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak yang spesifik, busana pesta adalah busana yang dikenakan dalam acara formal atau perayaan sering kali menggunakan bahan-bahan mewah dan desain yang lebih rumit dan busana sehari-hari adalah

²⁰ Eleanor Lambert, *Fashion: The Ultimate Guide*, (New York: Harper & Row, 1985), 6.



Malcom Bernard, *Fashion as Communication*. (London: Routledge, 2003),

arifah A. Riyanto, *Teori Busana* (Bandung: Lembaga Penerbitan Yayasan unan Indonesia (Yapemdo), 2003), 13.

busana yang dikenakan dalam kegiatan sehari-hari, biasanya lebih praktis dan nyaman.²³

Selain itu Wesnina dan Rahayu Purnama dalam bukunya inspirasi desain busana tradisional untuk tren modern menjelaskan tentang busana tradisional. Menurutnya busana tradisional adalah pakaian yang mencerminkan identitas budaya suatu daerah atau bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap busana tradisional biasanya memiliki ciri khas unik yang dipengaruhi oleh sejarah, adat-istiadat, nilai-nilai budaya, dan lingkungan alam dari masyarakatnya.²⁴ Malcolm turut berpendapat bahwa terdapat juga busana modern yakni busana yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya serta pengaruh globalisasi.²⁵

Menurut Martha Tilaar, tata rias adalah seni mempercantik wajah dengan cara menonjolkan keindahan wajah dan menyamarkan kekurangan, sehingga meningkatkan penampilan dan rasa percaya diri seseorang.²⁶ Sementara itu, Harymawan menyatakan bahwa tata rias adalah seni menggunakan produk kosmetik untuk mengubah penampilan wajah pemain di atas panggung sesuai dengan suasana yang diinginkan.²⁷

Tata rias terbagi menjadi beberapa jenis yaitu tata rias korektif, tata rias fantasi, tata rias karakter dan tata rias pengantin. Menurut Nelly Hakim tujuan dari

²³ Arifah A. Riyanto, *Teori Busana*, 13.

²⁴ Wesnina dan Rahayu Purnama, *Inspirasi Desain Busana Tradisional untuk Trend Modern* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 1.



Malcolm Bernard, *Fashion*, 22.

Martha Tilaar, *Kecantikan Perempuan Timur* (Jakarta: Indonesia Tera, 1993), 1.

Harymawan, *Dramaturgi* (Bandung: Rosda Karya, 1993), 34.

tata rias korektif adalah untuk mengubah penampilan fisik menjadi cantik.²⁸ Adapun menurut Endang Widjanarko tata rias korektif dapat menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi bagian yang kurang sempurna.²⁹ Lebih lanjut dia juga menjelaskan tata rias fantasi adalah seni tata rias yang bertujuan untuk memberi kesan wajah model dari wujud menjadi wujud khayalan yang disesuaikan dengan tema, tetapi bisa dikenali oleh orang yang melihatnya.³⁰ Sedangkan tata rias karakter menurutnya adalah tata rias yang dapat mengubah penampilan wajah baik secara umur, bangsa, sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada tokoh.³¹

Tata rias pengantin menurut Tien Santoso yakni tata rias yang memiliki kekuatan untuk merubah wajah lebih berseri, dan tampak istimewa dengan tetap mempertahankan kecantikan alami yang bersifat personal. Menurutnya setiap wanita ingin tampil cantik dan sempurna pada hari pernikahannya, karena momen tersebut terjadi satu kali dalam hidup seseorang. Ada kekhasan pada setiap daerah dan disesuaikan dengan tradisi di keluarga. Busana dan aksesoris memiliki lambang dan makna khusus dengan harapan kedua mempelai mempunyai kehidupan perkawinan yang bahagia dan sejahtera. Proses perkawinan terdapat bagian penting yaitu menjadikan pengantin sebagai pusat perhatian. Salah satu upaya menunjang

²⁸ Nelly Hakim, *Kosmetologi Tata Kecantikan Tingkat Dasar* (Jakarta: Meutis Cipta Sarana Bersama, 2001), 131.



Endang Widjanarko, *Rias Wajah* (Jakarta: Wahana Boga Cakrawala, 2006),

Endang Widjanarko, *Rias Wajah*, 47.

Endang Widjanarko, *Rias Wajah*, 47

penampilan pengantin agar terlihat anggun dan cantik adalah merias wajah pengantin tersebut.³²

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 tahun 1974) tentang perkawinan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan disebut pengantin.³³ Sedangkan menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³⁴

Hilman Hadikusuma mengemukakan, menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi

³² Tien Santoso. *Tata Rias dan Busana Pengantin Seluruh Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama, 2012), 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Iasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat* Universitas Al-Azhar, 2010), 4.



perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tata busana dan tata rias pengantin adalah tata cara untuk memperindah tampilan pria dan wanita dengan pakaian dan menghias diri pada upacara pernikahan.

1.7. Metode Penelitian

Metode berhubungan dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan penulisan sejarah.³⁶

1. Pengumpulan sumber (heuristik)

Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan sumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan ditulis. Pada bagian ini sumber terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sezaman atau sumber yang paling mendekati dengan peristiwa tersebut, sedangkan sumber sekunder atau bisa juga disebut dengan sumber kedua yang banyak ditulis oleh peneliti-peneliti terdahulu yang hampir memiliki kemiripan dengan sumber awalnya (primer).



Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Iman Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung, CV Mandar Maju, 1990), 8-

untowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (PT Benteng Pustaka, 2005), 90

Pengumpulan sumber (heuristik) memiliki beberapa teknik yang pertama studi kepustakaan, ini merupakan studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Kedua studi kearsipan, arsip menjadi penting karena merupakan sumber utama pada penelitian ini arsip didapatkan dari lembaga negara maupun swasta, perpustakaan, koran dan juga arsip-arsip pribadi tentang foto pernikahan.

Pada penelitian ini juga akan menggunakan sumber lisan, yakni penulis melakukan wawancara sebagai sumber lisan. Langkah-langkah sebelum penulis melakukan wawancara yakni yang pertama menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan tema yang akan diteliti, yang kedua setelah daftar pertanyaan disusun, penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan para pemerhati budaya, orang yang bekerja di salon dan *indo' botting* (juru rias pengantin adat Makassar dan Bugis).

2. Kritik sumber (verifikasi)

Pada bagian ini sumber-sumber yang telah dikumpulkan baik yang berupa benda, sumber tertulis (arsip/dokumen) serta sumber lisan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan dan kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah. Kemampuan sumber meliputi kompetensi, kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selain itu, kepentingan dan subjektivitas sumber serta

aan sumber untuk mengungkap kebenaran serta konsistensi sumber apa yang penulis teliti.



Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan arsip atau dokumen, memastikan suatu sumber apakah termasuk sumber asli atau salinan serta apakah sumber tersebut merupakan penulisan ulang atau hasil fotokopi. Kritik terhadap keaslian sumber sejarah di antaranya dapat dilakukan berdasarkan usia dan jenis budaya yang berkembang pada waktu peristiwa itu terjadi, jenis tulisan, huruf dan hal lain yang sifatnya sezaman dengan apa yang akan diteliti.

3. Interpretasi

Setelah pengumpulan sumber dan uji kredibilitas telah selesai dilakukan selanjutnya adalah tahap interpretasi atau penafsiran. Yang penting pada bagian ini adalah hubungan kausalitas antar sumber guna untuk peneliti bisa melakukan interpretasi atau penafsiran. Penafsiran disini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh peneliti baik dengan cara memparafrase ataupun dengan interpretasi sintesis, yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut.

4. Penulisan sejarah (historiografi)

Penulisan sejarah merupakan tahap terakhir untuk melakukan penulisan berdasarkan dengan fakta-fakta. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan fakta-fakta sejarah yang telah terstruktur secara sistematis dan kronologis serta pada tahap penulisan ini apa yang ditulis harus bisa dipertanggungjawabkan.



1.8. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah menguraikan dan menjelaskan karya ilmiah ini secara sistematis, runut dan menjadi satu kesatuan yang utuh maka penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah , batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Sulawesi Selatan Tahun 1930-1998

Bab Ini akan menjelaskan gambaran umum Sulawesi Selatan di Tahun 1930 termasuk kondisi masyarakat, jumlah penduduk selanjutnya akan dibahas mengenai masyarakat dan budaya di Sulawesi Selatan, juga akan membahas mengenai perubahan tradisi perkawinan dari tradisional menjadi modern.

BAB III Perkembangan Tata Busana dan Tata Rias Pengantin Masyarakat Sulawesi Selatan Tahun 1930-1945

Bab III akan menjelaskan perkembangan tata busana dan tata rias pengantin masyarakat Sulawesi Selatan tahun 1930-1945. Pada bab ini akan dijelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada tata rias dan tata busana pengantin di Sulawesi Selatan berdasarkan etnik yang terdapat di Sulawesi Selatan.

BAB IV Perkembangan Tata Busana dan Tata Rias Pengantin Masyarakat Sulawesi Tahun 1945-1998



o IV akan menjelaskan perkembangan tata busana dan tata rias pengantin at Sulawesi Selatan tahun 1945-1998. Pada bab ini akan menjelaskan

perubahan-perubahan yang terjadi secara umum terhadap tata busana dan tata rias pengantin masyarakat sulawesi selatan dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi.

BAB V Kesimpulan

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian ini mulai dari bab I sampai IV, bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini sekaligus menjadi penutup dalam penelitian penulis



BAB II

SULAWESI SELATAN TAHUN 1930-1998

2.1 Letak Geografis dan Administrasi Sulawesi Selatan

Wilayah Sulawesi Selatan berposisi di selatan pulau Sulawesi dengan ibukota sekarang bernama Makassar. Secara astronomis Sulawesi Selatan berada di antara 0 derajat 12'-8 derajat LS (Lintang Selatan) dan 116 derajat 48'-122 derajat 36' BT (Bujur Timur). Kondisi permukaan bumi Sulawesi Selatan mencakup dataran rendah sampai dataran tinggi.¹

Pada awal abad ke 20 Sulawesi juga biasa disebut celebes. Pulau ini adalah pulau terbesar keempat di Indonesia, terdiri dari daratan tengah bergunung-gunung yang sulit dilewati, dari mana membentang empat semenanjung utama Pulau Sulawesi. Luas daratan Sulawesi Selatan membentang kurang lebih 65.000 kilometer persegi, dan dilapisi tanah vulkanis.² Secara geografi Sulawesi Selatan dikelilingi oleh laut pada tiga tempat. Sebelah barat dibatasi oleh Selat Makassar, sebelah selatan oleh laut Flores, sebelah tenggara oleh Selat Bone dan sebelah utara oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu, Sulawesi Selatan juga disebut memiliki posisi maritim. Posisi yang demikian, memberikan peluang bagi orang Sulawesi Selatan terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pantai untuk



¹“Sistem Informasi Geografis Badan Pusat Statistik Indonesia,” BPS, Feb <http://www.sulsel.go.id/>

²Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan li Baliknya*, (Makassar: Penerbit Innawa, 2018), 19

memperkaya pengalaman dengan kehidupan laut, yaitu berlayar menjadi nelayan dan sebagainya.³



Gambar 2. 1 Kaart van Zuid-Celebes 1930 (Peta Sulawesi Selatan 1930)

(Sumber: KITLV No. 811845)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, wilayah itu dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*afdeling*) secara resmi pada tahun 1911.⁴ Seluruh daerah gubernur Sulawesi Selatan dan daerah taklukannya, terbagi ke dalam tujuh daerah *afdeling*, yaitu: *Afdeling* Makassar, dengan ibu kota Makassar, *Afdeling* Bonthain,



Iattulada, dkk *Geografi Budaya Daerah Sulawesi Selatan 1976* (Jakarta: Pustaka, 1976), 7.

J. Baron Quarles de Quarles, "Memorie van Overgave" (Mei 1908-1910), (Badan Arsip, Den Haag: ARA, Kotak AA. 205), hlm. 1-4; 1910, No. 573.

dengan ibu kota Bonthain, *Afdeling* Bone, dengan ibu kota Watampone, *Afdeling* Luwu, dengan ibu kota Palopo, *Afdeling* Pare-pare, dengan ibu kota Pare-pare, *Afdeling* Mandar, dengan ibu kota Majene dan *Afdeling* Buton dan Lauwi, dengan ibu kota Bau-bau di Sulawesi Tenggara. Kepala pemerintahan diembankan kepada seorang pejabat pemerintahan yang disebut gubernur (*gouverneur*). Di bagian pemerintahan (*afdeling*) ditempatkan seorang asisten residen (*asistent resident*) yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan di wilayah itu.⁵

Berdasarkan Volkstelling tahun 1930 jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 2.801.260 orang. *Afdeling* Makassar sebanyak 417.004 orang, *afdeling* Bonthain sebanyak 372.821 orang, *afdeling* Bone 651.955 orang, *afdeling* Parepare 369.545 orang, *afdeling* Mandar 235.798 orang, *afdeling* Luwu 383.834 orang dan *afdeling* Buton dan Lauwi sebanyak 370.303 orang.



dward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan
1906-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2004), 84

Tabel 2. 1 Tabel Persebaran Penduduk Sulawesi Selatan pada Masa Hindia Belanda Tahun 1930

No	Nama Daerah	Jumlah Penduduk				Total
		Pribumi	Eropa	Cina	Timur asing lainnya	
1	Afdeling Makassar	378.937	3.823	33.382	862	417.004
2	Afdeling Bonthain	371.463	150	1.033	175	372.821
3	Afdeling Bone	650.323	138	666	828	651.955
4	Afdeling Pare-pare	367.680	32	940	893	369.545
5	Afdeling Mandar	235.383	50	276	89	235.798
6	Afdeling Luwu	382.567	220	772	275	383.834
7	Afdeling Buton dan Lauwi	369.149	185	834	135	370.303
						2.801.260

(Sumber: Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Molukken, 129)

Etnik terbesar Bugis mendiami seluruh bagian timur dan separuh bagian barat dari semenanjung Sulawesi Selatan. Berikutnya Berdasarkan pada tabel jumlah penduduk di atas, terlihat bahwa jumlah pribumi lebih banyak dibanding jumlah penduduk Eropa, Cina maupun Timur Asing lainnya. Terlihat pula bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di *afdeling* Bone setelah itu *afdeling* Makassar yang berada di posisi ke dua. Dapat dilihat pula bahwa pada tahun 1930 penduduk yang berdarah Cina lebih besar dari bangsa Eropa maupun bangsa Timur asing lainnya.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Sulawesi Selatan sudah menjadi

ing didatangi oleh bangsa lainnya.



Pada masa awal proklamasi kemerdekaan hingga penyerahan kedaulatan tahun 1950, daerah tersebut terdiri atas enam *afdeling* dan satu kota besar. Dari enam *afdeling* dan satu kota besar itu kemudian berkembang menjadi 23 kabupaten termasuk didalamnya dua buah kotamadya, keenam *afdeling* tersebut yaitu: *Afdeling* Makassar dengan ibu kota Sungguminasa, *Afdeling* Parepare dengan ibu kota Parepare, *Afdeling* Mandar dengan ibu kota Majene, *afdeling* Luwu dengan ibu kota Palopo, *Afdeling* Bone dengan ibu kota Watampone dan *Afdeling* Bonthain dengan ibu kota Bonthain. Makassar menjadi satu-satunya yang berstatus kota besar dan menjadi ibu kota Sulawesi Selatan, selain itu pada masa NIT (Negara Indonesia Timur) tahun 1947 juga sebagai ibu kota seluruh Pulau Sulawesi.⁶

Tabel 2. 2 Persebaran Penduduk Sulawesi Selatan pada Kabupaten (Sebelum Pemekaran) Tahun 1952

No	Nama Daerah	Penduduk	Ibu Kota
1	Kota Besar Makassar	285.000	Makassar
2	Kabupaten Makassar	790.055	Sungguminasa
3	Kabupaten Parepare	492.555	Parepare
4	Kabupaten Mandar	319.739	Majene
5	Kabupaten Luwu	535.464	Palopo
6	Kabupaten Bone	910.669	Watampone
7	Kabupaten Bonthain	545.697	Bonthain
	Total	3.879.179	

(Sumber: Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar,1953), 25)



arita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan 1 Kebudayaan Daerah, 1981), 9

Sekitar tahun 1967 dilakukan pemekaran kabupaten sehingga di Sulawesi Selatan menjadi 21 kabupaten dan 2 kotamadya. Kabupaten Makassar dimekarkan menjadi 5 kabupaten, yakni Gowa, Takalar, Jenepono, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), dan Maros. Kabupaten Parepare terbagi menjadi 4 kabupaten yaitu Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang. Kabupaten Mandar menjadi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas). Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten Luwu dan Kabupaten Tana Toraja (Tator), Kabupaten Bone menjadi tiga yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Sedangkan Kabupaten Bonthain menjadi Kabupaten Bonthain, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai. Persebaran penduduk tahun 1969 dapat dilihat pada tabel 2.3.



Tabel 2. 3 Persebaran Penduduk Sulawesi Selatan pada Kabupaten-Kabupaten (Setelah Pemekaran) Tahun 1969

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Kota Madya Makassar	8	44	450.104
2	Gowa	8	56	349.629
3	Maros	4	46	181.366
4	Pangkajene	9	83	195.280
5	Jeneponto	5	28	271.893
6	Takalar	6	35	155.441
7	Bantaeng	3	12	84.178
8	Selayar	5	20	102.257
9	Bulukumba	7	43	247.979
10	Sinjai	5	38	145.178
11	Wajo	10	51	416.178
12	Soppeng	5	26	235.060
13	Bone	21	206	786.254
14	Kota Parepare	3	12	79.560
15	Barro	5	25	171.119
16	Sidenreng Rappang	7	32	196.387
17	Pinrang	7	37	250.589
18	Enrekang	5	30	180.797
19	Luwu	16	143	352.705
20	Tana Toraja	9	64	327.142
21	Mamuju	5	23	70.722
22	Majene	4	20	81.040
23	Polewali Mandar	8	83	311.537
	Total			5.643.067

(Sumber: Laporan Bagian Statistik dan Sensus, Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Desember, 1969)



2.2. Masyarakat dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan

Identifikasi kelompok-kelompok masyarakat atau etnik yang bermukim di Sulawesi Selatan bermula pada abad 19 ditandai dengan muncul konsepsi *To Manurung*. Bermula dari persamaan lambang-lambang bunyi bahasa, peralatan hidup yang sesuai dengan lingkungan masing-masing. Muncullah *To-Wugi* (Bugis), *To-Raja*, *To Mangkasa'* (Makassar) dan *To-Menre'* (Mandar). Identifikasi itu kemudian diterima menjadi sebutan atas kelompok-kelompok kaum yang bergabung menjadi semakin besar, dan orangpun menamakannya kelompok-kelompok etnik Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar, sebagai empat kelompok etnik utama Sulawesi Selatan.⁷

Berdasarkan etnik pada tabel 2.3 jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 1969 antara lain etnik Makassar sekitar 1.500.000 jiwa, etnik Bugis sekitar 3.500.000 jiwa, etnik Toraja sekitar 500.000 jiwa dan etnik Mandar sekitar 250.000 jiwa. Dari data tersebut membuktikan bahwa etnik Bugis adalah etnik terbesar di daerah ini.⁸

1. Etnik Makassar

Etnik Makassar mendiami wilayah pantai selatan dan sebagian pantai barat Sulawesi yang beriklim agak kering dan panas serta di wilayah pegunungan bagian selatan. Wilayah permukiman etnik ini (*Butta Mangkasara'/Makkasara*, berarti "Tanah Makassar") meliputi sebagian daerah pemerintah Hindia Belanda



attulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Ujung Hasanuddin University Press, 1998), 69-70

arita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan*, 11.

(*Gouvernements Landen*), seperti distrik utara (Pangkajene dan Maros), Makassar dan pulau-pulau sekitarnya (termasuk Kepulauan Spermonde), Distrik Selatan (Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng), distrik timur (sebagian Bulukumba, terutama di daerah pegunungan dan pesisir pantai tenggara) serta Pulau Selayar. Sedangkan penduduk di wilayah kesultanan Gowa mayoritas beretnis Makassar. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakatnya disebut dengan *Basa Mangkasara'* atau *Basa Makkasara'* (Bahasa Makassar).⁹

Awal pembentukan pemerintahan di daerah ini menurut tradisi lisan masyarakat menunjukkan bahwa tempat cikal-bakal pemukiman pertama adalah tempat ditemukan *gaukang*¹⁰. Kesatuan mereka kemudian merupakan satu kesatuan pemerintah yang disebut *bori*. Penemu *gaukang* kemudian dijadikan pemimpin *bori* yang disebut *matoa* yang berperan sebagai pemimpin keagamaan maupun keduniaan, memimpin upacara-upacara adat dan keagamaan, upacara permulaan pekerjaan dan panen dan menyelesaikan serta memutuskan perkara persengketaan yang terjadi antara anggota masyarakat.¹¹

Kemudian muncul konfederasi yang beranggotakan beberapa *bori* karena ketiadaan jaminan ketentraman dan ketertiban yang mewarnai keberadaan pemerintahan itu, mendorong para pemimpin *bori* menjalin persahabatan dan

⁹ Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan*, 5

¹⁰ Gaukang adalah benda yang menurut masyarakat berbentuk aneh sehingga sebagai benda titisan, suci dan memiliki kekuatan gaib. Oleh karena itu sebagai penjaga jiwa Masyarakat secara khusus. (lihat dalam Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan*, 80).

Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik*, 24.



mengadakan ikatan perjanjian untuk saling membantu. Muncul pula Konfederasi Gowa yang selanjutnya menjadi kerajaan diawali dengan ditemukan seorang tokoh yang diceritakan berasal dari kayangan, seorang putri yang cantik. Tokoh itu yang disebut *Tomanurung*. Sejak saat itu masyarakat hidup dalam sistem kerajaan.¹²

Sistem kerajaan mengakibatkan adanya stratifikasi masyarakat. Sistem kerajaan bukan hanya terjadi di masyarakat Makassar tetapi di Bugis dan Mandar juga. Sistem sosial Bugis dan Makassar tradisional tersebut mencakup sistem stratifikasi sosial yang mengatur posisi setiap anggota masyarakat berdasarkan garis keturunan mereka.¹³ Stratifikasi etnik Makassar tersebut antara lain: Golongan bangsawan (*karaeng*), Golongan Tomaradeka (*tobaji*) dan Golongan *ata*.¹⁴

Selain sistem stratifikasi terdapat pula sistem pemerintahan yang membagi semua warga ke dalam sejumlah unit-unit teritorial, yang masing-masing memiliki penguasa atau pemimpin. Kedua sistem tersebut diharapkan dapat menghasilkan stabilitas sosial. Sementara itu, ada sistem lain yang memungkinkan terjadi mobilitas sosial dan persaingan antar pemimpin, begitu pula kerja sama antar-

¹² *Tumanurung* adalah sosok manusia dari dunia lain yang dianggap keturunan dewa, biasanya turun dari langit, bisa laki-laki maupun Perempuan. Rakyat setempat yang terpecah-belah kemudian meminta agar makhluk eksotik ini bersedia menjadi penguasa mereka (Ilham Daeng Makkelo, "Sejarah Makassar dan Tradisi Literasi," *Lembaran Sejarah* Vol. 15 no. 1(April, 2019): 35.)



Christian Pelras, *Hierarchy et Povoit traditionnels en pays Wadjo*. (*Article Archipel* 1,1971), 169.

It. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara perkawinan Daerah Sulawesi* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi 2011), 21-23.

lapisan sosial berbeda, serta integrasi ke dalam kelompok-kelompok yang melampaui atau mengabaikan batas teritorial yakni sistem patron klien.¹⁵

Dalam sistem patron-klien, seorang patron umumnya seorang bangsawan, di wilayah Makassar disebut *tu nipinawang* atau *karaeng* yang artinya orang yang memiliki sejumlah pengikut yang disebut *joaq, anaq-anaq* (anak-anak) atau hanya disebut *tau* (orang). Kewajiban utama seorang patron terhadap pengikutnya adalah melindungi mereka dari kesewenang-wenangan bangsawan lain, ketidakamanan, pencurian, atau bentuk ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya kewajiban klien terhadap patron mereka adalah memberikan pelayanan, misalnya dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan lainnya.¹⁶

Meski sistem itu mengakibatkan orang-orang dibagi-bagi ke dalam kelompok berbeda, namun hal itu berbeda dengan pemilahan orang ke dalam status atau unit teritorial atau kerajaan karena pemilah-milahan tersebut memiliki ciri khas yang absolut, di mana keanggotaannya ditentukan oleh keturunan atau tempat tinggal. Sebaliknya keterlibatan dengan seorang patron berlangsung sukarela, dan kelangsungan hubungan tersebut bergantung kepada keinginan kedua bela pihak. Meski secara teoritis hubungan yang dijalin bersifat sukarela, namun ketergantungan ekonomis klien kadang membuat posisi seorang klien sulit

¹⁵ Christian Pelras, "Hubungan Patron-Klien pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan" dalam *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi* editor Roger Tol, Kees van Dijk dan Greg Acciaioli (Makassar: Innawa; CITLV-Jakarta, 2009), 29.

Hasan Walinono, *Tanete; Suatu Studi sosiologi Politik* (Ujung Pandang: Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin, 1979), 113.



dibedakan dengan sistem perbudakan yang telah diperlunak yang dahulu diterapkan di wilayah tersebut.¹⁷

Sistem patron-klien masyarakat tradisional Makassar tidak hanya berkaitan dengan politik namun juga kegiatan ekonomi mereka. Hubungan patron-klien, yang selalu didasarkan pada pertukaran barang dan jasa, sehingga hubungan ini mendorong dan meningkatkan arus pertukaran ekonomi dalam masyarakat secara luas. Selain itu terdapat pula kaitan antara kekuasaan politik dengan kontrol atas lahan. Seperti di Gowa banyak bangsawan memiliki lahan lebih luas namun petani tidak memiliki lahan, di wilayah tersebut juga terdapat *tana arajang* atau tanah pusaka, yakni lahan milik kerajaan atau *wanua* yang dan disewakan kepada petani yang biaya sewanya diterima oleh penguasa, terdapat pula lahan jenis lain yang disebut *tana pammase* (tana pemberian) dan *tana ongko* (tana istimewa). Lahan tersebut dimiliki oleh para bangsawan.¹⁸

Banyak orang yang bergantung secara ekonomis kepada para bangsawan, termasuk para budak (*ata*) yang tidak memiliki apapun dan bergantung sepenuhnya kepada belas kasih sang tuan. Sebagian lainnya diberi hak mengolah sendiri lahan; begitu pula halnya dengan pengikut biasa yang termasuk kategori orang merdeka tetapi miskin dan bergantung kepada kedermawanan tuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, para bangsawan penguasa pun memperoleh keuntungan dari berbagai bentuk pelayanan cuma-cuma. Mereka tidak harus mengolah sendiri lahan; untuk membajak, menanam, memanen dan mengerjakan



Christian Pelras, *Hubungan Patron-Klien*, 30

Christian Pelras, *Hubungan Patron-Klien*, 40.

tugas pertanian lainnya. Para pengikut juga dipanggil ketika sang bangsawan hendak membangun atau pindah rumah, mempersiapkan pesta perkawinan atau upacara besar lainnya.¹⁹

Selain bertani masyarakat tradisional Makassar sampai tahun 1940 an juga mengenal berbagai mata pencaharian seperti berburu, meramu, menangkap ikan, beternak, berlayar dan berdagang.²⁰ Mereka juga menangkap ikan di sungai, tebat, laut, empang, dan sawah. Penangkapan umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki baik secara perorangan maupun dengan cara berkelompok. Menangkap ikan secara perorangan menggunakan *pekang* (kail), *banrong*, dan jala juga memasang bubu yang dipakai di sungai maupun laut. Menangkap ikan di laut umumnya dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan perahu, beserta peralatan disebut *ajjala batang*, *ajjala rompong*, *abbagang*, *ammekang*, *attorani*, *appukak*, *attalibbo*, *attude*, *attaripang*, dan sebagainya. Perahu yang digunakan mulai dari perahu kecil sampai dengan perahu-perahu besar. Kelompok ini dipimpin oleh seorang *pongawa* dan anggotanya disebut *sawi*.

Penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan setiap waktu kecuali ada beberapa jenis ikan yang bermusim seperti ikan tawarani dan ikan awu-awu. Nelayan yang menangkap ikan di laut disebut *pattorani*. Selain itu mereka juga beternak yang umumnya dilakukan oleh para petani. Jenis hewan yang dipelihara adalah kerbau, sapi, kuda, kambing, ayam, dan itik. Pemeliharaan sapi dan kerbau dilakukan masih



Christian Pelras, *Hubungan Patron-Klien*, 50.

Rachmah, *Monografi Kebudayaan Makassar di Sulawesi Selatan* (Surabaya: Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 1984), 7-20.

dengan cara tradisional dengan melepaskan hewan tersebut di padang rumput. Umumnya masyarakat tidak beternak secara besar-besaran.²¹

Masa antara permulaan abad ke-16 hingga awal pertengahan paruh kedua abad ke-17, masyarakat Makassar berkembang dalam sektor perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Gowa dapat dikatakan sebagai pusat kekuasaan di Sulawesi Selatan dan pusat perdagangan jalur perdagangan di Nusantara pada bagian utara. Pada permulaan abad ke-17, Makassar telah merupakan bandar niaga yang terpenting. Hal itu didorong oleh peranan oleh pelaut-pelaut Makassar dan Bugis dalam dunia pelayaran dan perdagangan.²²

Masyarakat tradisional Makassar juga dituntut untuk memiliki keterampilan bertenun dan pengolahan logam. Bertenun bagi perempuan dan pengolahan logam bagi laki-laki. Pembuatan pakaian masih dilakukan dengan cara ditenun menggunakan alat-alat tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu. Penggunaan pakaian bagi masyarakat Makassar masih sederhana hanya menggunakan sehelai kain atau sarung. Sedangkan pakaian adat untuk perempuan terdiri dari baju dan sarung, baju tersebut disebut *baju bodo* dan sarung yang disebut *lipa'* sedangkan untuk laki-laki menggunakan baju yang disebut *jas tutup* dan *bella dada*. Penggunaan pakaian tersebut juga berdasarkan klasifikasi masyarakat.²³

Sebagai tempat tinggal, masyarakat Makassar membangun rumah panggung yang disebut *balla*, dengan bentuk segi empat. Tata letak tiangnya mencerminkan



²¹ Achmah, *Monografi Kebudayaan Makassar*, 20-24.

²² Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX Studi tentang Kebijakan Maritim* (Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 27.

²³ Achmah, *Monografi Kebudayaan Makassar*, 42.

status sosial: rumah biasa memiliki lima tiang berjejer ke samping dan ke belakang, sementara rumah bangsawan memiliki lima tiang ke samping dan enam atau lebih ke belakang. Atap *balla* berbentuk pelana, bersudut lancip ke bawah, dan umumnya terbuat dari nipah, rumbia, bambu, alang-alang, ijuk, atau sirap. Bagian depan dan belakang puncak rumah yang berbatasan dengan dinding berbentuk segitiga dikenal sebagai *timpaksela*.²⁴

Derajat kebangsawanan pemilik *balla* dapat dikenali dari *timpaksela* ini: susunan tiga tingkat menunjukkan rumah bangsawan biasa, sedangkan susunan lima atau tujuh tingkat menandakan rumah bangsawan tinggi yang memegang jabatan pemerintahan. Akses menuju *balla* juga diatur berdasarkan hierarki sosial. Tangga rumah (*tukak*) memiliki ketentuan pemakaiannya, terdiri dari *sapana* (tangga bambu anyaman dengan tiga atau empat induk tangga) dan *coccorang* (tempat pegangan) yang hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Adapula *tukak* biasa yang terbuat dari kayu atau bambu; tangga ini memiliki dua atau tiga induk tangga untuk bangsawan, sementara untuk orang biasa tanpa *coccorang*, dengan anak tangga yang selalu ganjil (yaitu 5, 7, 9, dan seterusnya).²⁵

Struktur ruangan dalam *balla* dirancang secara fungsional. Terdapat *dego-dego* (ruangan kecil dekat tangga sebagai tempat beristirahat dan menunggu), *tambing* (lorong yang letaknya lebih rendah di samping *kale balla*), dan *kale balla* (induk rumah yang terdiri dari beberapa petak atau *paddaserang*). Bagian *paddaserang* paling depan disebut *paddaserang ridallekang*, bagian tengah disebut



Rachmah, *Monografi Kebudayaan Makassar*, 40.

Rachmah, *Monografi Kebudayaan Makassar*, 40.

paddaserang tangnga berfungsi sebagai kamar keluarga, dan *paddaserang riboko* di bagian belakang berfungsi sebagai kamar gadis-gadis. Selain itu, terdapat *balla pallu* (dapur dan tempat penyimpanan alat-alat dapur), serta *pammakkang* (ruang bagian atas atau loteng yang berfungsi sebagai tempat alat-alat suci, penyimpanan padi, kamar gadis-gadis, dan tempat alat-alat rumah tangga). Lantai rumah terbuat dari papan (*daparaks*) atau bambu (*daserak*). Penting untuk dicatat bahwa proses pendirian *balla* selalu didahului dengan upacara-upacara adat yang sarat makna.²⁶

Masyarakat tradisional Makassar dalam hal pendidikan sebelum Islam di Sulawesi Selatan bersumber dari lontara begitupun masyarakat Bugis dan Mandar. Berbagai jenis lontara mengajarkan tentang berbagai hal-hal dalam kehidupan dan harus memahami pengetahuan tentang *saukang*. Jenis-jenis *lontara* yaitu: 1) *lontara pappaseng* yakni kumpulan amanat atau pesan orang bijaksana untuk diturunkan kepada keluarga dan generasi berikutnya pesan untuk jujur, tegas dan memelihara kata-kata juga bertutur kata yang baik²⁷; 2) *Lontara ade'* yang berisi naskah peraturan hukum/adat. Masyarakat luas juga harus mempelajari *lontara* yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari.

Bagi penduduk yang mengerjakan sawah harus memahami *lontara paggalung*. *Paggalung* artinya petani sawah. Pada *lontarak* tersebut dapat dipelajari keadaan cuaca, musim yang baik, keadaan hujan, jenis tanaman-tanaman yang menguntungkan dsb. Terdapat pula *lontara* yang berisi petunjuk pelaksanaan



Kachmah, *Monografi Kebudayaan Makassar*, 41.

Muhammad Salim, *Peranan Lountarak sebagai Sumber Pangedering*,
undang: Skripsi Fakultas Hukum FIKP UVAT, 1978), 11.

pelayaran yaitu *lontara alloping loping*. Naskah ini memberikan petunjuk mengenai hukum pelayaran. Sehubungan dengan tata krama tercantum dalam *lontara attoriolong*, naskah ini meriwayatkan perbuatan baik para raja yang lampau. *Lontara pangngja'* berisi tentang nasihat yang diperuntukkan untuk mendidik keturunan. Pengetahuan mengenai astrologi didapat pada *lontara kotika*. Keseluruhan norma-norma adat yang mempengaruhi tingkah laku pada etnik Makassar yaitu *pangadakkang* dan *lontara latoa* yang berisi sumber pendidikan bagi masyarakat Bugis dan Makassar.²⁸

Melalui pendidikan khusus di dalam istana putra putri raja diajar oleh para cerdas cendekia kerajaan atau biasa disebut *guru andi* atau juga *palontarak*. Guru bidang kebatinan oleh *sanro* dan guru latihan pertahanan diri oleh *pandegararak*. Proses pengajaran juga terjadi melalui percontohan, kerja sendiri, teguran bila melanggar, dan peniruan tingkah laku langsung dari orang tua. Di rumah tangga ibu menjadi pemegang kendali terhadap pemindahan nilai sebagaimana tercantum dalam *lontara*. Terhadap pengetahuan praktis, misalnya bertani dan pekerjaan lain yang dilakukan diluar rumah dipegang oleh ayah. Lembaga resmi yang berbentuk wadah formal belum dikenal.²⁹

Masyarakat Makassar sebelum diterimanya agama islam menjadi agama kerajaan mereka mengenal sistem kepercayaan yang disebut *Patuntung*. *Patuntung* dapat dianggap sebagai sinkritisme antara kepercayaan asli dengan samawi karena selain memiliki beberapa persyaratan yang biasanya harus dimiliki suatu agama



Barita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan* 24-28.

Barita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan*, 29.

langit yaitu mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta juga mempercayai adanya kekuatan-kekuatan seperti kepercayaan Animisme dan dinamisme.³⁰

2. Etnik Bugis

Etnik yang kedua adalah Bugis, kelompok etnik Bugis adalah kelompok yang paling besar jumlah populasinya di wilayah ini. Orang-orang Bugis menjadi masyarakat yang memiliki pengaruh kekuasaan serta pasukan militer kuat di hampir seluruh kawasan semenanjung tersebut. Hal ini terjadi setelah berakhirnya perang Makassar (1666-1669), ditandai dengan adanya transisi kekuasaan politik atas semenanjung Sulawesi Selatan dari Kesultanan Gowa ke Kesultanan Bone sejak masa Aru Palakka Sultan Saaduddin di akhir abad ke-17. *Tana Ugi'* atau daerah-daerah yang berpenduduk mayoritas orang Bugis dan menuturkan *basa ugi'*, wilayah ini meliputi kawasan pertanian yang luas dan subur di seluruh pantai timur, sebagian pantai barat, daerah perbukitan, dan wilayah pedalaman Sulawesi bagian Selatan. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah: Bone, Soppeng, Wajo, Tanete, Barru, Lamuru, Konfederasi Ajatappareng, dan Konfederasi Tellu Limpoe (Tondong, Bulo-Bulo, dan Lamatti di Sinjai) serta sebagian kecil Bulukumba di Distrik Timur (Terutama di daerah Bulukumba lama dan pesisir Pantai Selatan).³¹

Dalam kehidupan masyarakat Bugis sendiri, interaksi sehari-hari pada umumnya berdasarkan sistem patron-klien seperti yang telah dijelaskan pada etnik



Iustaqim Pabbajah, "Religiusitas dan Kepercayaan Orang Bugis-". (*Jurnal Al-Ulum*, 2012), 401.

Mattulada, *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan*, 3.

Makassar. Sejalan dengan itu sistem stratifikasi sosial menetapkan status seseorang berdasarkan keturunan. Bagi Etnik Bugis ada tiga lapisan pokok atau stratifikasi sosial mereka yakni *Anak Arung* (anak *karaeng*), *Tomaradeka/Tumaradeka* dan *Ata*. Lapisan pertama (*anak arung/anak karaeng*) adalah lapisan masyarakat bangsawan atau kerabat raja, lapisan *To Maradeka/Tumaradeka* adalah lapisan masyarakat kebanyakan atau orang-orang yang merdeka (bebas) tapi bukan bangsawan dan lapisan ketiga adalah *Ata* atau hamba sahaya yang dikuasai oleh para bangsawan, karena mereka ini adalah orang-orang yang ditangkap dalam peperangan, orang-orang yang tidak membayar utang dan orang yang melanggar pantangan adat.³²

Berbagai mata pencaharian masyarakat Bugis yakni pertanian, nelayan dan penembak ikan, juga bidang kerajinan seperti pertenunan dan pengolahan logam, perdagangan laut dan pelayaran, dan juga pembuatan perahu. Kegiatan ekonomi pertanian orang Bugis tetap berpusat pada beras. Kemudian meskipun jumlah nelayan atau petambak ikan di Sulawesi Selatan relatif lebih kecil dibandingkan jumlah petani pengolahan tanah, namun, hal itu tidak berarti orang Bugis menganggap perikanan kurang penting dibanding pertanian. Ikan adalah salah satu lauk pokok orang Bugis.

Orang Bugis memiliki tradisi kesusastraan, baik lisan maupun tulisan. Perpaduan antara tradisi lisan dan sastra tulis itu kemudian menghasilkan salah satu epos sastra terbesar di dunia yakni *La Galigo*. Selanjutnya, sejak awal abad ke-17



4. Yamin Sani, dkk. *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Nilai-nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen an dan Kebudayaan, 1989), 23.

Masehi, setelah menganut agama Islam, mereka menjadikan agama Islam sebagai integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka. Meskipun demikian, pada saat yang sama. Berbagai kepercayaan peninggalan pra Islam tetap mereka pertahankan sampai abad ke-20. Salah satu peninggalan dari zaman pra-Islam itu adalah tradisi para *Bissu*.³³

3. Etnik Toraja

Di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan juga menetap etnik Toraja. Istilah Toraja pada mulanya hanyalah sebagai keterangan atau petunjuk tentang kaum yang bermukim di dataran tinggi, yang kemudian disebut Tana-Toraja (Negeri orang ri-aja). Istilah Toraja kemudian juga membawa makna kelompok kaum yang lambat laun membedakan diri dari kelompok-kelompok kaum To Luwu' yang menetap di kawasan pantai.³⁴

Pemukiman Toraja di dataran tinggi hidup berkelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok anang di *wanua Ugi'*. Mereka hidup dalam isolasi masing-masing, di lereng-lereng gunung dalam hutan-hutan yang sepi dan terhindar dari kemungkinan gangguan dari luar. Suasana yang terisolasi itu lambat laun tidak dapat terus bertahan, karena keinginan memperbesar jumlah warga dengan menjalin hubungan dengan warga lainnya, menjadi desakan yang semakin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Akhirnya timbul kesepakatan antara kaum-



³³ Sebuah kelompok yang terdiri atas pendeta-pendeta 'wadam' yang masih kan ritual perdukunan serta dianggap dapat berkomunikasi dengan dewa-dhur. (Halilintar Latief, *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Takassar*: Desantara, 2004), 40)

A. Yamin Sani, dkk. *Arti Lambang dan Fungsi*, 58

kaum itu untuk mengadakan pertemuan dan bermusyawarah yang disebut *Ma' kombong kalua'*, *tumimbu mallambe'*, yaitu kesepakatan membuat desa-desa pemukiman yang disebut *bua'*. Gabungan beberapa *bua'* membentuk wilayah pemukiman yang lebih luas yang disebut lembang. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, terbentuklah 40 buah lembang, sebagai wilayah adat otonom, Setiap lembang dipimpin oleh seorang *Arruan* atau *Ampu Lembang*, sehingga dikenal juga *Arruan Patangpulo* Setiap lembang memiliki *Tongkonan Layuk* (rumah Adat keluarga), sebagai pusat pemeliharaan jiwa persekutuan kaum yang dipandang amat berwibawa terhadap semuaarganya.³⁵

Bagi orang Toraja sistem kekerabatan mereka tetap terpelihara dengan adanya *Tongkonan layuk*. *Tongkonan* bukan hanya diartikan sebagai rumah atau bangunan tetapi pola permukiman yang juga terdiri dari beberapa elemen yakni *Tongkonan-Alang: Anak Dara/Londong*³⁶. Dari sudut tongkonan yang merepresentasikan kesuburan tiga pucuk tanah dapat harus terdapat tanah yang dibagi ke dalam sejumlah tanah sakral tempat pelaksanaan upacara, sawah-sawah dan tanah basah, sungai, parit dan tanah kering. Sedangkan dari sudut alang yang merepresentasikan kematian tanah dibagi ke dalam lokasi upacara kematian, tambun tanah, kuburan-kuburan dan hutan.³⁷

³⁵ M. Yamin Sani, dkk. *Arti Lambang dan Fungsi*, 41.

³⁶ Hubungan antara tongkonan dan alang dapat direduksi ke simbol utama yaitu hubungan antara perempuan dan laki-laki. Lumbang mendapat gelar *londongna banua*, 'ayam jantan rumah'. Ungkapan ini menunjuk pada ide laki-laki. Stanislaus Sandarupa, *Kebudayaan Toraja Modal Bangsa, Milik Dunia*, (*Jurnal osiohumaniora*, 2014, 5).

Stanislaus Sandarupa, "Kebudayaan Toraja Modal Bangsa, Milik Dunia", (*osiohumaniora*, 2014), 4.



Perjalanan antar-komunitas sangat lambat dan sulit karena wilayahnya yang tidak datar. Keterkucilan secara fisik mengurangi keperluan atau keinginan untuk melaksanakan konfederasi permanen seperti yang terjadi di daerah-daerah Bugis dan Makassar. Yang muncul di Toraja adalah persatuan yang longgar antar komunitas sebagaimana yang ada di Mandar yang bertindak secara bersama-sama ketika dibutuhkan, tapi tidak pernah menyerahkan diri kepada kesatuan yang lebih tinggi. Dulu ada konfederasi Toraja yang relatif kuat disebut *tallulembangna* terdiri dari Sangalla', Makale dan Mengkendek. Mereka mempunyai nenek moyang yang sama dan masing-masing anggota konfederasi ini diperintah oleh seorang *Puang* (tuan). Pada awal abad ke-17 sampai abad ke-18, komunitas Toraja Sa'dan bergabung menjadi satu untuk melawan invasi Bugis. Namun ketika ancaman itu berlalu, mereka kembali ke daerah masing-masing dan mencairkan situasi itu. Tradisi Toraja juga tidak pernah bersuara tentang adanya percobaan dari seorang pemimpin Toraja untuk menyatukan seluruh komunitas Toraja.³⁸

Segala pengetahuan tradisional masyarakat Toraja berdasarkan kepercayaan *aluk todolo* yang mengajarkan bahwa diluar diri manusia terdapat tiga unsur kekuasaan yang wajib dipercayai akan kebenaran dan kebesarannya yaitu *Puang Matua* (Tuhan Yang Maha Esa), *Deata-deata* (Dewa-dewa) dan *To Mebali Puang* (arwa leluhur).³⁹



Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan 17* (Makassar: Ininnawa, 2004), 20.

Mukhlis Paeni, *dkk. Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Jakarta: Proyek sasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), 31.

Sistem kepercayaan *Aluk To dolo* mengkonsepsikan dunia atas sebagai suatu tempat yang dapat dicapai dalam suatu perjalanan panjang lewat transformasi 'arwah' yang kompleks yaitu dari *bombo* ke *bombo mendeatanna* dan *mendeatanna/engkapuanganna* disertai korban hewan. Inilah yang turut mengatur perilaku masyarakat Toraja dalam ritual seperti *mantunu* dan keseharian seperti membangun rumah, berpakaian dan lain-lain.⁴⁰

Aluk To dolo mengatur sistem klasifikasi pada masyarakat termasuk stratifikasi kasta atau di Toraja disebut *tana'* yang terdiri dari; 1) *Tana' bulaan* (bangsawan tinggi). *Tana'* ini tergolong pewaris *sukaran Aluk* yang dipercayakan mengatur hidup dan memimpin ajaran tersebut. Gelarnya adalah *puang, ma'dina*. Dan *sokkong bayu (siambe')*; 2) *Tana' Bassi* (bangsawan menengah). *Tana'* ini tergolong pewaris yang menerima *maluangan batang* (pembantu pemerintahan adat) yang bertugas mengatur kepemimpinan dan pendidikan; 3) *Tana' karurung* (rakyat kebanyakan). *Tana'* ini sebagai pewaris *pande* yakni para pekerja terampil. *Tana'* ini juga bertugas menjadi pembina *aluk todolo* untuk urusan *Aluk Patuoan, Aluk Tananan*, yang disebut *indo padang* (pembina upacara ritual kesuburan); 4) *Tana kua-kua* (Pengabdian/hamba). *Tana'* ini tergolong lapisan hamba sahaya sebagai pengabdian *tana' bulaan* dan *tana' bassi*. *Tana'* ini juga disebut *tana' matuttu inaa* (pekerja). Juga bertugas pada penyelenggaraan pemakaman yang dinamakan *to mebalun* atau *to mekayu* (bertugas membungkus jenazah).⁴¹



Stanislaus Sandarupa, "Kebudayaan Toraja", 1.

L.T. Tangdilintin, *Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya* (Jakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2009), 218.

Klasifikasi *tana'* tersebut menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota masyarakatnya pada berbagai aktivitas, khususnya penyelenggaraan upacara ritual dan adat. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan upacara tertentu, apapun wujudnya harus berdasarkan *Aluk Todolo*. Adanya sistem *tana'* ini senantiasa berkaitan dengan sistem kehidupan. Ini berarti bahwa sistem *tana'* yang kini dimaknai sebagai pelapisan sosial menjadi dasar mengatur aspek ritual, adat, dan sosial, seperti pemakaman, pernikahan, pengangkatan pemerintahan adat, dan lain sebagainya, yang memberikan sumbangsih bagi perkembangan sosial dan budaya masyarakat Toraja.⁴²

Selain itu pengetahuan sistem ekonomi juga telah diatur dalam kepercayaan *aluk to dolo* yakni *puang matua* mengamanahkan kepada *Pande Kambuno Langi'* untuk mengembangkan tugas *pande (keterampilan)* seperti petani, peternak, ahli perang dan sebagainya. Terdapat juga empat persekutuan hidup antara manusia, tanaman, hewan dan tempat tinggal yaitu *Aluk Ma' lolo Tau* aturan perihal hubungan antar sesama manusia, *aluk Ma'lolo Patuoan*, aturan perihal hewan dan pemanfaatannya, *Aluk Ma'lolo Tananan*, aturan perihal tumbuhan/tanaman dan pemanfaatannya dan *Aluk Ma' lolo Bangunan Banua*, aturan perihal hunian/bangunan dan pemanfaatannya.⁴³

Masyarakat Toraja memanfaatkan tanaman dan hewan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi petani dan peternak. Kondisi wilayah Toraja yang tidak datar mengakibatkan pertanian tidak terlalu berkembang di daerah ini namun



..T. Tangdilintin, *Toraja Sebuah Penggalan*, 219.

..T. Tangdilintin, *Toraja Sebuah Penggalan*, 217.

masyarakat Toraja terkenal dengan pertanian kopinya. Setelah itu hasil pertanian maupun hasil ternak mereka jual ke pasar sehingga pasar menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat Toraja.

4. Etnik Mandar

Etnik yang juga mendiami Sulawesi Selatan yaitu Mandar. Mandar adalah sebutan untuk salah satu etnik yang berbudaya Maritim.⁴⁴ Penamaan Mandar jika dilihat dari sudut pandang bahasa terdapat dua arti pertama, diyakini toponimi suku mandar ini berkaitan dengan sungai Mandar yang hulunya berada di kecamatan Malunda atau Kabupaten Majene dan muaranya di kota Tinambung. Kedua berasal dari bahasa Hindu yang terdiri dari dua kata, yaitu *man* dan *dhar* yang jika disatukan akan membentuk kata *dharman* dan artinya adalah memiliki penduduk. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa penamaan suku Mandar ini tertuju kepada dua hal, yaitu berkaitan dengan jadinya tanah Mandarnya dan juga dengan masyarakat Mandarnya.⁴⁵

Orang Mandar menempati wilayah pesisir dan pegunungan di barat daya. Orang Mandar dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang hidup di kampung-kampung pegunungan, yang secara kolektif disebut *Pitu Ulunna Salu*.



⁴⁴ Irma Dwi Jayanti, Isrina Siregar, Budi Purnomo, Suku Mandar: Mengenal Kebudayaan Maritim dari Provinsi Sulawesi Barat (*Jurnal Pendidikan Sejarah & KIP Universitas Jambi*, 2023), 74.

Annisa, N. S. Tradisi Mappande Sasi' di Dusun Tangnga-Tangnga di Polewali Mandar (Studi Budaya Islam). (*Rihlah: Jurnal Sejarah dan Sastra*, 145-156. *CULTURE. Meraja Jurnal*, 2022), 625- 639.

Mereka ini secara etnis adalah orang Toraja. Dan mereka yang tinggal di pesisir, yang berada di bawah sebuah konfederasi, *Pitu Babanna Binanga*.⁴⁶

Orang Mandar mengucapkan bahasa Mandar dan telah memiliki kesusasteraan tertulis dalam bentuk *Lontara*. Huruf yang dipakai adalah aksara *Lontara*. *Lontar* Mandar disebutkan bahwa *Tomanurung* sebagai nenek moyang orang Mandar tidak turun di daerah Mandar tetapi turun di hulu sungai Saq dang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Mandar yang terdiri dari *Pitu Ulunna Salu* dan *Pitu Ba'bana Binanga*, serta *Arua Taparitti'na Uwai*. Salah satu yang turun di Mandar adalah Pangkopadang yang kemudian memiliki keturunan yang salah satunya bernama Tiurra-urra yang kemudian kawin dengan *Tomakaka Napo*, maka lahirlah Iweappas. Iweappas kemudian kawin dengan *Puang Digandang* dan lahirlah anak bernama Imanyambungi yang menjadi Mara'dia pertama Balanipa, dan setelah wafat diberi gelar *Todilaling*.⁴⁷

Sebelum berbentuk kerajaan dahulu Kerajaan Balanipa terdiri dari beberapa negeri yang dipimpin oleh *tomakaka*, yaitu Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang todang. Dari empat negeri inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Balanipa. Pada awalnya empat negeri ini sepakat untuk mempersatukan wilayah kekuasaannya dalam satu ikatan persekutuan yang kemudian dikenal dengan persekutuan *Appaq Banua Kaiyyang* (empat negeri besar). Dibentuknya persekutuan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari *tomakaka* yang agresif



Leonard Y. Andaya, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan 17* (Makassar: Ininnawa, 2004), 13.

Edward Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat* (Makassar, acca, 2012), 12.

ingin menguasai *tomakaka* lain, seperti *tomakaka* Passokkorang, *tomakaka* Lenggo, *tomakaka* Lempong dan *tomakaka* Tande.⁴⁸

Pada kenyataannya terbentuknya persekutuan *Appeq Banua Kaiyang* dibawa kepemimpinan *tomakaka* Napo, tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga mereka mencari sosok yang dinilai bisa dan mampu menyelamatkan rakyat dan keutuhan wilayah dari ancaman *tomakaka* yang ingin berkuasa. Di bawah pimpinan I Manyumbungi, persekutuan *Apeq Banua Kaiyyang* berubah menjadi Kerajaan Balanipa, dan berubah pula nama gelar pimpinan yang sebelumnya dikenal dengan *tomakaka* menjadi *pappuangan* (seseorang yang dipertuankan) yaitu *Pappuanagan* Napo, *Pappuangan* Samasundu, *Pappuangan* Mosso dan *Pappuangan* Todang-todang. Masing-masing mereka mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada mereka. Selain sebagai pemimpin daerah *pappuangan* juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan *dewan ada' kaiyyang* (adat besar). Dewan *ada' kaiyyang* yang kemudian berhak memilih dan mengangkat serta memberhentikan seorang raja atau *mara'dia* pada Kerajaan Balanipa.⁴⁹

Raja pada kerajaan Mandar hanyalah yang berasal dari golongan bangsawan. Etnik Mandar sendiri memiliki stratifikasi sosial, antara lain 1) Golongan Bangsawan/raja; 2) Golongan bangsawan hadat atau *Tau Pia*; 3) Golongan *Tau Maradeka* yakni orang biasa; 3) Golongan budak atau *batua*. Golongan bangsawan



Muhammad Amir, *Gerakan Mara'dia Tokape di Mandar 1970-1873* (Surabaya: De La Macca, 2014), 27.

Edward Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya*, 33

hadat merupakan golongan yang paling banyak jumlahnya. Mereka tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan raja supaya ada pemisahan/ raja hanya ada pada lambang.⁵⁰

Keadaan geografis telah menyediakan potensi alam yang turut mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduk Mandar. Wilayah Mandar yang berbentuk laut, pegunungan dan daratan menjadikan para penduduk yang bermukim di daerah tersebut bergelut dibidang pertanian, perkebunan dan hasil hutan serta nelayan. Orang Mandar memang dikenal sebagai pelaut, baik sebagai penangkap ikan (*posasi*), maupun sebagai pelayar (*passombal*). Bentang alam Mandar yang memiliki garis pantai dari Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju sampai Mamuju Utara atau pantai-pantai barat pulau Sulawesi, menyebabkan sebagian orang Mandar berpencaharian sebagai nelayan. Karena itu pula, orang Mandar sejak masih kanak-kanak sudah dibiasakan untuk menghadapi gulungan ombak di pantai, bahkan sejak usia anak, sudah dibiasakan untuk mendayung perahu di tengah laut, sehingga laut menjadi sebuah ruang untuk pendewasaan. Karena itu pula bagi orang Mandar, selama laut membentang luas, mereka tidak akan kelaparan. Laut adalah rezeki yang harus dicapai walaupun itu harus didapat melalui perjuangan keras menghadapi rintangan badai dan ganasnya gelombang dengan *Lopi Sandeq*.⁵¹

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, usaha penangkapan ikan dan



st. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara perkawinan*, 139

Sani dan Muhammad Yamin, *Kearifan Tradisi dan Pembangunan iutan Dinamika Masyarakat dan Pembangunan di Provinsi Sulawesi akassar*: Masagena Press, 2016), 106.

telur ikan terbang menggunakan perahu pakur, perahu khas penduduk Sulawesi Barat, mereka melanglang buana menjajakan produksi mereka disamping produksi pertanian mereka juga menjajakan hasil industri rumah tangga dalam bentuk sarung sutera yang dikenal dengan sutera Mandar, tali temali dan *karoror* (anyaman untuk layar perahu).⁵²

Komoditas yang biasanya ditanam oleh petani antara lain, padi sawah, padi ladang, kacang-kacangan, sayur sayuran, jagung, dan buah-buahan merupakan komoditas utama dalam pertanian yang biasanya ditanam oleh pengguna dan paggalung, perkebunan yang biasanya ditanami coklat, kelapa sawit dan cengkeh digeluti oleh *pattinggas*. Di Mandar terdapat beberapa pasar tradisional dimana terjadi kontak antara pembeli dan penjual. Di Pasar inilah hasil bumi yang didapatkan setelah menunggu beberapa bulan untuk panen kemudian dipasarkan, orang-orang yang bekerja disektor ini disebut *padanggang*. Mata pencaharian *pa'dagang*, *padanggang* di Balanipa kebanyakan dilakukan oleh golongan *tau maradeka* atau *tau samar* (orang biasa) perdagangan tetap dikoordinasi oleh *turunan ada'*. Ia merupakan golongan perantara, penadah, pengumpul hasil kerja *panguma*, *patinggas*, *posasi*, dan *passombal*, yang selanjutnya menjual ketempat lain. Ia juga sebagai perantara untuk keperluan sehari-hari dan juga keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Kebanyakan mereka menguasai pasar dan tempat perdagangan serta mendirikan rumah yang digunakan sebagai tempat



Edward Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya*, 21.

menjual yang strategis.⁵³

Lautan yang luas menyediakan berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang cukup kaya di Mandar, hal ini kemudian menjadi salah satu mata pencaharian di Mandar, selain sebagai nelayan tangkap, pencari ikan, dan pelayar masyarakat di Mandar juga mengenal petani tambak. Petani tambak biasanya membuat empang tidak jauh dari laut. Biasanya para petani ini akan memasukkan bibit ikan/ nener ikan bandeng ke dalam kolam pembesaran sebelum dilepas ke empang. Selain ikan bandeng, petani juga membuat budidaya rumput laut, udang dan ikan lele. Perikanan darat terdapat disekitar pantai. Penduduk membuat *kalobang* (tambak) sebagai tempat memelihara ikan bandeng, udang dan kepiting. Pengisian tambak berupa nener (bibit ikan bandeng) dan benur (bibit udang) didapat dari hasil penangkapan di sekitar teluk Mandar. Kegiatan itu yang merupakan mata pencaharian yang melibatkan sejumlah orang dengan peralatan yang sederhana.⁵⁴



Syamsu Rijal *dkk*, *Potensi Sejarah dan Budaya Mandar dalam Perspektif ta* (Makassar, Politeknik Pariwisata Makassar, 2019), 72.

Darmawan Mas'ud Rahman, *Puang dan Daeng, Sistem Nilai Budaya ilanipa Mandar* (Makassar, Yayasan Menara Ilmu, 2014), 20.

2.2 Modernisasi di Sulawesi Selatan

Sebelum datangnya pengaruh-pengaruh kebudayaan besar dunia di Nusantara secara umum telah terdapat lapisan kebudayaan asli. Kebudayaan-kebudayaan asli ini kemudian menerima sentuhan kebudayaan dunia seperti;

- 1) kebudayaan Cina dan Mongolia, yang terkesan kuat diterima dalam kehidupan kesenian, etika ketimuran dan upacara-upacara dalam istana-istana, di hampir semua negeri, kerajaan lokal di Nusantara
- 2) Kebudayaan India (Hindu-Budha), yang berpengaruh terhadap tata-kehidupan sosial politik, dengan jenjang hierarki masyarakat yang amat kuat terpelihara. Pengaruh itu berabad lamanya berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan negara atau kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa.
- 3) Kehidupan Islam. Ajaran Islam memberikan kesadaran untuk hanya menyembah kepada Allah SWT. Ajaran ini secara perorangan diterima oleh pedagang-pedagang orang Sulawesi Selatan dari perjalanannya ke negeri-negeri Islam di Jawa dan Sumatera atau Semenanjung Malaka. Kemudian, permulaan abad XVII (1605) ajaran Islam diterima menjadi agama Kerajaan Gowa-Tallo, dan kemudian disiarkan dan diterima oleh seluruh negeri di Sulawesi Selatan.
- 4) Kebudayaan Barat (Eropa), kebudayaan ini membawah pengaruh tentang kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai kunci



untuk memasuki dunia modern. Kemajuan itu dapat dicapai dengan mengikuti Pendidikan pula.⁵⁵

Selain itu bangsa-bangsa Eropa terutama Portugis, Spanyol dan kemudian Belanda selain berdagang mereka juga melakukan “*missi suci*” membawa peradaban dengan penginjilan Kristen. Tetapi penyebaran agama Katolik sesudah itu tidak diteruskan lagi oleh orang Belanda sehingga pengaruhnya cepat menghilang kecuali di dataran tinggi Sulawesi seperti Toraja.⁵⁶

Pengaruh kebudayaan Cina, India (Hindu) di Sulawesi Selatan dapat diketahui dari tradisi lisan dan kesusastraan suci *I La Galigo*, juga di pantai barat Sulawesi Selatan seperti di Sampaga ditemukan benda-benda purbakala. Pengaruh Islam dan barat sudah menyentuh masyarakat Sulawesi Selatan pada awal abad XV. Ketika itu di Sulawesi Selatan sedang berlangsung kegiatan kerajaan berdasarkan konsepsi kekuasaan *To Manurung*.⁵⁷

Karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang menerima budaya luar. Seperti yang terlihat pada etnik Bugis dan Makassar mereka termasuk salah satu yang paling reseptif, terutama terhadap unsur-unsur luar yang mereka anggap bermanfaat itulah sebabnya kebudayaan Sulawesi Selatan cenderung dipengaruhi unsur dari luar.⁵⁸

⁵⁵ Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan*, 84.

. Noorduyn, *Sejarah Agama Kristen di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Badan Kristen, 1964), 88.

Mattulada, *Sejarah Masyarakat, dan Kebudayaan*, 84.

Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 141.



Dengan demikian gambaran para ilmuwan tentang masyarakat tradisional Sulawesi Selatan pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad 20 seperti B.F Matthes, James Brooke, Ida Pfeiffer Fritz Sarasin dan Paul terutama Bugis bukanlah gambaran masyarakat statis ‘kolot‘ dan tidak pernah berubah melainkan masyarakat yang lentur dan mampu menjalani proses perubahan terus menerus sesuai zaman. Banyak unsur luar yang telah diserap ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan Sulawesi Selatan selama ini memperkaya hukum adat, tatanan sosial politik, adat-istiadat, ritual dan kepercayaan, tingkah laku, pekerjaan sehari-hari, teknologi, pengetahuan, cerita rakyat, hiburan, gaya hidup dan sastra.⁵⁹

Momen penting yang menandai masa transisi masyarakat Sulawesi Selatan menuju modernisasi adalah berdirinya Singapura pada 1819. Pintu keluar-masuk barang di Asia Tenggara tersebut merupakan poros aktivitas perdagangan mereka di Nusantara hingga dekade 1950-an, karena merupakan tempat persinggahan usaha mereka di Tanah Melayu, Sumatra dan Kalimantan, tempat persinggahan dalam perjalanan naik haji ke Mekah, serta pusat penyebaran pengetahuan dan informasi. Namun tahun 1824 Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian wilayah dagang dan pengaruh politik masing-masing sehingga muncul konsep Hindia Belanda dimana kekuasaan Inggris dan Belanda semakin melebar.⁶⁰

Wilayah Sulawesi Selatan yang berada diantara wilayah tersebut turut terkena imbas atas perubahannya. Sejak 1824 hingga awal abad ke 20 Belanda berusaha keras untuk memperkuat pengaruh di wilayah Sulawesi Selatan. Hingga pada



Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 173.

Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 174.

periode kolonial Belanda tahun 1906-1945 Belanda berhasil menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah Hindia Belanda yang secara *de jure* meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sekarang.⁶¹

Belanda kemudian berhasil mengadakan perubahan radikal dalam organisasi politik masyarakat Sulawesi Selatan seluruhnya melalui konsep yang disebut "penguasaan tidak langsung".⁶² Sejak saat itu wilayah ini berada dalam keterhubungan dengan perkembangan kemoderenan yang berlangsung di beberapa kota di Indonesia. Modernisasi yang terjadi di kota ini terjadi disemua aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial ekonomi, hingga budaya.⁶³

Modernisasi juga terjadi karena masyarakat tumbuh sejalan dengan perkembangan organisasi pemerintahan, pendidikan dengan gaya barat dan juga perkembangan teknologi. Tahun 1930 mulai terjadi modernisasi gelombang kedua dengan berkembangnya iklan.⁶⁴ Keterlibatan pemerintah kolonial Belanda dalam pemerintahan di Indonesia juga ikut menuntut banyaknya perubahan-perubahan pada sarana fisik daerah jajahannya. Hal ini didasari oleh kebutuhan hidup orang-orang Eropa. Orang Belanda terbiasa dengan hidup mewah dan membangun fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Permukiman yang ditinggali pemerintah Belanda harus tertata agar sesuai dengan standar hidup kebiasaan orang-orang Eropa. Akibat desakan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan

⁶¹ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik*, 192.

Christian Pelras, Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 174.

Djoko Soekiman, *Sejarah Sosial Konseptualisasi, Model Dan lainnya*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Ombak, 2013), 3.

Henk Schulte Nordholt. *Outward Appearances*, 6



iklim, alam, kekuasaan dan tuntutan hidup sesuai dengan daerah tropis, mereka mendirikan berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan sekeliling. Demikian, pembangunan fasilitas daerah ini mengalami banyak kebaruan ditambah dengan tuntutan hidup masyarakat perkotaan yang kemudian menghadirkan pemenuhan fasilitas lain.⁶⁵

Makassar sebagai pusat pemerintahan menjadikan kota ini lebih berkembang dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Kota Makassar secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom atau *Gemeente Van Makassar* pada tanggal 1 April 1906 dengan itu Kota Makassar memiliki otoritas terhadap kebijakan atas wilayah pemerintahan dan berhak mengatur wilayahnya sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1938, *Gemeente* Makassar disahkan menjadi *stad Gemeente* Makassar yang membawahi beberapa distrik pemerintahan. Permukiman-permukiman baru seperti *Vlaardingen* dan Kampung Baru tumbuh di sebelah utara dan selatan benteng dan dihuni oleh masyarakat termasuk Melayu, Cina, Belanda, Bugis, Jawa, dan tentu saja kelompok makassar dari Gowa dan sekitarnya. Di Tahun 1930 di kota Makassar terdapat hampir 3500 penduduk Eropa, lebih dari 15.000 Cina dan lebih dari 65.000 Bumiputera dari berbagai daerah di Hindia.⁶⁶

Pada awal abad ke-20, Kota Makassar telah mengalami perkembangan menjadi sebuah kota yang kosmopolitan yang didatangi oleh berbagai masyarakat baik dari daerah lain di Sulawesi Selatan maupun dari luar Sulawesi Selatan.⁶⁷



Joko Soekiman, *Sejarah Sosial*, 10.

Nias Pradadimara, "Penduduk Kota, Warga Kota, dan Sejarah Kota: Kisah" (Airlangga University, 2004), 3.

Muchlis Paeni dkk. *Sejarah Sosial*, 10.

Dengan beragamnya masyarakat dan perubahan kehidupan masyarakat, pemerintah kemudian melakukan penataan lingkungan dan pembangunan fasilitas.

Perkembangan Makassar sebagai kota dagang dan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Belanda di Sulawesi pada khususnya dan kawasan timur Nusantara pada umumnya sesudah kejatuhan Gowa 1667, secara otomatis menimbulkan konsekuensi-konsekuensi logis di bidang pembangunan fisik untuk kebutuhan-kebutuhan di kota, seperti pembangunan perumahan dan gedung-gedung, pembuatan dan perbaikan jalanan, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan sarana-sarana sosial lainnya dan sebagainya. Sistem birokrasi Kota Makassar sejalan dengan upaya pembangunan sarana fisik perkotaan.⁶⁸

Pembangunan tersebut membuka lapangan pekerjaan baru dan mengundang penduduk untuk datang ke Makassar mengadu untung kemajuan. Keramaian dan fasilitas yang ada di Kota Makassar merupakan faktor yang ikut menarik perpindahan penduduk baik dari daerah pedalaman maupun antar pulau.⁶⁹ Sebelum tahun 1900, rumah tinggal *permanen* (rumah batu) di Makassar masih sangat kurang seperti halnya di *Temple Street* atau Jalan Kelenteng yang masih berderet-deret rumah-rumah bambu beratapkan daun nipa.⁷⁰ Rumah-rumah *permanen* yang ada ketika itu antara lain beberapa rumah pejabat Hindia Belanda di Kampung Balandaya, beberapa buah terpecar dalam wilayah sesudah tahun 1910

⁶⁸ Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi Dan Proses 'Etnisasi' Sebuah Kota" (*Jurnal Populasi*, 2003), 82.

Muchlis Paeni dkk. *Sejarah Sosial*, 10.

Tjeng Tjong Hae. *Riwayatnya Kelenteng-kelenteng Tionghoa di Makassar* (Surabaya: Buku peringatan persatuan Tionghoa Peranakan (PERTIP), 1953), 149.



penggunaan bangunan atau rumah-rumah permanen sudah mulai meningkat, namun dalam jumlah yang masih juga sedikit. Rumah tinggal permanen masih terbatas pada beberapa pejabat pemerintahan Belanda, pedagang atau pengusaha dengan ekonomi yang besar dan beberapa pribumi kaya. Bentuk-bentuk dasar dari rumah-rumah tersebut baik rumah panggung, rumah bawah/petak untuk tempat tinggal ataupun pertokoan/usaha, dan juga rumah tinggal permanen yang berpekarangan depannya agak luas atau letaknya agak jauh dari jalanan, tidak banyak mengalami perubahan sampai sekarang.⁷¹

Selain bentuk rumah yang sudah mengalami perkembangan, penataan lingkungannya pun lebih teratur menghadap ke jalan raya dan umumnya sudah memiliki sumur, jalanan-jalanan utama sudah diaspal, dan saluran pembuangan air termasuk got atau selokan permanent sudah ada. Dibangun pula got-got besar dalam kota. Di bagian barat kota, berdiri dengan megah menghadap Selat Makassar Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) di *Fortweg* (sekarang jalan amanagappa) Selain itu terdapat pula bangunan-bangunan instansi/lembaga/kantor pemerintahan, militer dan beberapa perusahaan antara lain kantor *Gouverneur Celebes Onderhoorigheden* (Gubernur Sulawesi dan Daerah taklukannya) kemudian ditempati juga sebagai kantor *Gouverneur Grote Oost* (Gubernur Timur Besar), kantor *Residen Zuid Celebes* (Celebes atau Sulawesi Selatan), dan juga kantor pemerintah kota Makassar (sekarang jalan Bali), Penjara Makassar yang terletak di sebelah utara lapangan karebosi, kantor kejaksaan dan pengadilan di *Justisilaan*

; Jalan Amanagappa), selain itu juga terdapat beberapa kantor-kantor



Muchlis Paeni dkk. *Sejarah Sosial*, 54.

dagang/perusahaan diantaranya: *Niegio, Bataavsche Petroleum Maatshappij* (BPM) yaitu perusahaan Minyak di Ujung Tanah, *Celebes Transport Maatschappij* (Cetram), yaitu perusahaan pengangkut milik seorang Yahudi terdapat di sudut *Wijnveldweg* dan *Lajangweg*. Beberapa bank yaitu Bankenpool dan *volkscreedietbank* di *Raaveleinsweg* dan beberapa rumah sakit/ lembaga kesehatan. Rumah sakit itu antara lain Militair Hospital (Rumah sakit Militer) di sisi Utara *Hoospitalweg* (sekarang ditempati Rumah Sakit Angkatan Darat Pelamonia) Rumah Sakit “dadi” dan klinik dari Bala Keselamatan di sisi selatan *Dadiwee*⁷². Rumah Sakit Santa Melania, Rumah sakit labuang baji, rumah sakit Stella Maris dan poliklinik-poliklinik terdapat di Rumah Sakit Stella Maris, Poliklinik Kotapraja di *Pattunuangweg*, poliklinik Persatuan Islam di *Marosweg*, Poliklinik Rumah sakit Labuang Baji dan Palang Merah Cina di Jalan Ende.

Tempat-tempat peribadatan juga dibangun antara lain Masjid-masjid yang sudah permanen yaitu Masjid Tallo, Masjid Maloku, Masjid Ende, Masjid Arab dan Masjid Wajo, gereja-gereja antara lain gereja Emmanuel, Gereja Katedral dan beberapa klenteng terdapat di *Templestraat*: klenteng yang termasuk tua dan bangunannya permanen ialah klenteng Dewi Ma Tjo Poh, Kelenteng Tjo Soe Kong dan Kelenteng Kanton Bean Gie Koan. Tempat hiburan dan hotel juga sudah dibangun antara lain Bioskop Luxor, bioskop Sirene, Bioskop Lok Siang Sia selain



⁷² Sebelum masa pendudukan Jepang Rumah sakit ini berfungsi khusus empat perawatan orang gila. Pada zaman kekuasaan Jepang dan sesudah caan, selain berfungsi sebagai tempat perawatan orang gila, dikembangkan rumah sakit umum. Sekarang Rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Daerah (RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. (lihat pada ddadi.sulselprov.go.id/tentang-kami)

itu bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya terdapat tempat hiburan khusus, yang terkenal ialah Society de Harmony. Untuk menunjang pariwisata di Tahun 1930an juga terdapat hotel yakni Speelman Hotel di Hogepad, Grand Hotel di Hogepad, dan Empress Hotel di Komedian.

Pendidikan juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah di Kota Makassar. Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan pendidikan ala barat dan dimulai di ibukota daerah yaitu Makassar. Ada dua badan utama yang melaksanakan kegiatan pendidikan di daerah Sulawesi Selatan, yakni pemerintah kolonial Hindia Belanda dan *Zending* juga *Missie* kedua pelaksana itu saling membantu, berhubung pihak *Zending* dan *Missie* juga berasal dari Belanda dan Eropa lainnya.⁷³

Beberapa gedung sekolah yang dibangun memiliki perbedaan bagi orang-orang Eropa dan masyarakat Bumiputera. Pendirian sekolah pertama yakni pada tahun 1906 pemerintah yang bernama *Hollandsche Ambonsche School*⁷⁴, tahun 1907 dibangun lagi sebuah H.A.S (*Hollandsche Ambonsche School*) sehingga sekolah jenis itu menjadi 2 buah. Khusus orang Cina pada tahun itu juga dibangun sekolah H.C.S (*Hollandsche Sineche School*) di Jalan Timur (*Timor Weg*). Di sebelah selatan Karebosi *Inlandsche School*.



Sarita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan*, 50.

Di Makassar disebut dengan Sikola Ambong, Sekolah ini khusus didirikan atas jasa kepada orang-orang Ambon yang sedang bertugas selaku tentara Belanda menyerang para raja ketika penaklukan Sulawesi Selatan. (Sarita dkk, *Sejarah Pendidikan*, 54)

Usaha pengembangan pendidikan bagi penduduk pedesaan mulai pada tahun 1907. Pendirian sekolah jenis itu termasuk usaha Gubernur Jenderal van Heutz, yang menganjurkan agar tahun itu didirikan sekolah-sekolah di desa. Oleh sebab itu, didirikan sekolah yang bernama *Volksschool* di Maros, Pangkajene, Sigeri, Parepare, Pinrang, Majene, Limbung, Bonthain, Watampone, Sengkang, Paria, dan Palopo namun jumlah murid yang masuk tidak mencapai target karena kehidupan penduduk belum pulih dari situasi peperangan, penduduk curiga terhadap tujuan sekolah (pendidikan) kebanyakan orang tua menganggap memasuki sekolah akan dijadikan tentara Belanda dan ada pula yang menganggap, bahwa akan dibawah ke negeri Belanda, setelah tamat dari sekolah itu. Waktu itu pergi keluar negeri dianggap sebuah kengerian, bukan suatu nikmat sebagaimana pandangan sekarang. Hingga pada tahun 1910 pemerintah hanya mengelola tingkat formal yang dinamakan sekolah dasar yakni *Inlandsche School* yang berada di kota utama dan *Volksschool* pada setiap desa utama, dimana terdapat pemukiman yang cukup padat penduduknya.⁷⁵

Pada tahun 1911 di Makassar dibangun H.I.S (*Holland Inlandsche School*) selanjutnya pada tahun (1912-1920) dibuka pula H.I.S di daerah lain seperti di Bulukumba, Bonthain, Watampone, Palopo, dan Pare-pare. Pada tahun 1920, di Makassar didirikan sekolah lanjutan pertama yaitu MULO (*Middelbare Uitgebruik Lagere Schaa Onderwijs*), Pada tahun 1921, pemerintah mendirikan pula OSVIA (*Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Makassar*). Untuk bangsa

dan orang Eropa lainnya disediakan E.L.S (*Eropesche Lager School*).

arita Pawiloy dkk, *Sejarah Pendidikan*, 56.



Di Toraja sendiri pembangunan sekolah dikelola oleh *Zending*. Pendirian lembaga pendidikan yang diasuh *Zending* dan *Missie* erat hubungannya dengan usaha penyebaran agama Kristen. Toraja dipilih karena Bugis dan Makassar saat itu telah menetapkan agama Islam sebagai agama kerajaan sedangkan di Toraja masih menganut kepercayaan nenek Moyang mereka yakni *Aluk Todolo*. Pada tahun 1907 seorang pendeta yang bernama Antonie Aris van de Loosdrecht pergi ke Toraja pada waktu dia tiba di Tanah Toraja baru ada dua buah sekolah pemerintah yang disebut sekolah *landschap* yang berada di Rantepao dan di Makale. Di Luwu pun yakni di Kota Palopo pada tahun 1908 baru ada satu sekolah.⁷⁶

Melihat kurangnya sekolah *landschap* yang berdiri di Tana Toraja maka direncanakan oleh A. A. Van de Loosdrecht membuka sekolah *Zending* di Tonga distrik Kesu pada November 1913. Tawaran itu disambut baik oleh Pong Maramba sebagai kepala distrik yang juga adalah pemuka adat setempat. Sekolah-sekolah yang didirikan A.A. Van de Loosdrecht semakin bertambah, berkat bantuan pemuda-pemuda Toraja yang telah menjadi Kristen. Kegiatan *Zending* di Tana Toraja terbilang berjasa dalam perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya tanah Toraja. Hingga tahun 1930, sekolah pemerintah tetap hanya dua buah sedangkan *Zending* dapat mendirikan 79 buah sekolah, seperti yang tercantum pada tabel 2.4.



Sarita Pawiloy, *dkk*, *Sejarah Pendidikan*, 66.

Tabel 2. 4 Keadaan Pendidikan yang Diasuh Zending di Makale-Rantepao tahun 1938

Nama sekolah	Gedung	Guru	Murid
Volksschool (Sekolah desa)	73	160	7.546
Shakelschool Makale	1	5	175
Vervolgschool Makale	1	6	227
Normaalcursus Barana'	1	1	20
Sekolah Rumah Tangga	1	2	50
Sekolah Guru Injil	1	2	7
C.T.S	1	2	44
Total	79	178	8.069

(Sumber: Sarita Pawiloy dkk, Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, hlm 74)

Selain di Toraja *Zending* juga mendirikan 15 sekolah sampai tahun 1938 di Luwu, di daerah Mandar dan Mamasa terdapat 7 sekolah dan di Enrekang 3 buah sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1930 pembangunan sekolah telah merata hampir di semua daerah di Sulawesi selatan. Sekolah-sekolah tersebut juga telah mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk mencari sekolah-sekolah lanjutan yang berada di Kota Makassar sebagai pusat.

Organisasi pergerakan Islam Muhammadiyah juga amat giat dalam mengembangkan pendidikan baik kota-kota *afdeling* maupun di kota-kota *onderafdeling*. Guru-guru sekolah Muhammadiyah didatangkan dari pulau Jawa atau Sumatera. Mereka selain menjadi pendidik juga biasanya menjadi penganjur

an bersifat kebangsaan dan menyebarkan semangat kebangsaan Indonesia. uga mengajarkan tentang hak-hak kemerdekaan bagi setiap bangsa dan



oleh karena itu menanamkan benih-benih untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.⁷⁷

Antara tahun 1925 sampai dengan tahun 1940, kegiatan *Gubernemen* Hindia Belanda menata Sulawesi Selatan dengan sangat apik menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pendidikan umumpun mendapat kemajuan yang cepat, dan sekolah-sekolah untuk menjadi pamong praja dan Sekolah Guru di Makassar mendapat perhatian yang cukup dari para pemuka masyarakat Sulawesi Selatan. Kota Makassar pun menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak dari wilayah Timur Indonesia.⁷⁸

Sampai tahun 1965 karena keadaan di Sulawesi Selatan terus mengalami kekacauan sejak zaman Jepang, zaman revolusi dan zaman pemberontakan Kahar Muzakkar, maka perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan menjadi sangat terbelakang apabila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian usaha memajukan pendidikan di kota-kota tetap mendapat perhatian khusus selain usaha pemulihan keadaan kembali dalam sektor ekonomi, sarana dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. Hasilnya terlihat pada tabel 2.5 dimana terlihat pertambahan jumlah berbagai sekolah umum dan kejuruan, pemerintah maupun swasta, selama 20 tahun terakhir ini.

Selain sekolah-sekolah yang tercantum dalam tabel 2.5 terdapat juga sekolah agama, tersebar luas di Sulawesi Selatan. Sekolah-sekolah agama ini banyak yang diasuh oleh yayasan-yayasan pendidikan swasta dari organisasi-organisasi seperti



Mattulada, *Sejarah Masyarakat*, 804.

Mattulada, *Sejarah Masyarakat*, 804.

Muhammadiyah, Darudda'wah al Irsjad, Assa'diah, Misbah, Maiatul Islamiah, Perguruan Islam dan Badan Pendidikan Islam. Pendidikan agama-agama lainnya, juga diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Kristen Protestan dan Katolik dalam sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah Teologi Menengah, Seminari Katolik dan sebagainya. Pendidikan Tinggi sudah ada di Makassar sejak permulaan zaman kemerdekaan yakni Universitas Hasanuddin dan IKIP Negeri Makassar dan beberapa universitas swasta lainnya.⁷⁹

Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah-sekolah Umum dan Kejuruan di antara tahun 1950-1969

No	Jenis Sekolah	Tahun 1950	Tahun 1960	Tahun 1969	Jumlah Murid tahun 1969
1	Taman Kanak-kanak	1	67	115	6.854
2	Sekolah Dasar	186	2.808	4.211	653.551
3	SMP	7	56	188	53.200
4	SMEP	4	19	45	8.451
5	SMA	2	18	64	13.900
6	SMEA	1	3	14	8.452
7	SGB	2	29		
8	SGA/PGA	1	11	24	8.520
9	Kursus Guru A		4	12	1.350
10	SGTG		1		
11	SGKP	1			
12	SKP	1	12	15	1.052
13	ST	1	11	39	7.997
14	STM		3	7	3.492
15	SKKP		8	16	1.320
16	PGSLP		1	1	1.300
17	KDP	1	2	2	295



Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djamban, 1984), 276.

18	KPA		1	1	281
19	KPPA		1	2	295
20	SHD	1	1		
21	SPP		1		
22	KGST		1		
23	KKPA		1	1	400
24	SPSA		1	1	250
25	Sekolah Pelayaran		1	1	250
26	Sekolah Farmasi		1	1	250
27	SPMA	1	1	1	400

(Sumber: Catatan di Kantor Perwakilan Dep. PDK Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar (Tahun 1950-1965))

Dapat dikatakan, bahwa penataan daerah-daerah kekuasaan *Gubernemen* Hindia Belanda sampai tahun 1940, juga pembangunan setelah kemerdekaan Indonesia sudah menciptakan kondisi yang mendorong penduduk Sulawesi Selatan meraih kemajuan-kemajuan dalam lapangan pendidikan umum, kejuruan dan sekolah keagamaan. Juga dalam lapangan ekonomi pertanian dan perdagangan. Dengan kemajuan tersebut muncul golongan elite baru di Sulawesi Selatan yang disebut *kaum ambtenaar*.⁸⁰

Walaupun *kaum ambtenaar* telah memperoleh pendidikan modern, namun kebanyakan mereka masih mempertahankan satu identitas masa lampau yang berorientasi kepada status dan selalu berusaha mendapatkan status lebih tinggi,

⁸⁰ Kaum *ambtenaar* ini terutama mereka yang termasuk dalam kalangan *Binnenlands Bestuur Ambtenaar (B.B.A)* yang memperoleh Pendidikan atau lari sekolah-sekolah pamong praja, seperti OSVIA atau CIBA kebanyakan au direkrut dari kalangan yang menempati lapisan atas masyarakat lampau Selatan yaitu kalangan keturunan atau keluarga bangsawan, atau raja-raja lokal yang dijadikan daerah-daerah *Zelfbestuurende landschappe*. la, *Sejarah Masyarakat*, 408).



serta mencontohi pola kehidupan dan tingkah laku lahiriah kepemimpinan tradisional. Masyarakat sudah terbiasa dengan pola itu pun menerimanya sebagai suatu keadaan wajar yang berlanjut dari zaman lampau. Namun terjadi perubahan stratifikasi sosial baru di Sulawesi Selatan yaitu:

- a) Kaum *anakarung* (bangsawan) yang setia kepada Belanda dan kaum *Ambtenaar BB*. Disebut kelas utama.
- b) Kaum *ambtenaar* Gubernemen lainnya, yakni kalangan cendekiawan dari berbagai bidang lainnya yang telah mendapat pendidikan formal dan kalangan ulama Islam/Adat, serta para pemimpin pergerakan sosial. Disebut kelas kedua.
- c) Kaum hartawan, pedagang dan pengusaha lainnya. Disebut kelas dasar.

Perubahan strata dan elite sosial Sulawesi Selatan seperti yang tertera di atas memperlihatkan adanya indikasi mengikuti tradisi suatu proses-sosial yang berlangsung dengan mempergunakan prestasi atau *achievement* yang dicapai oleh seseorang untuk dapat sampai ke jenjang yang lebih tinggi.⁸¹

Dari sektor perdagangan di Kota Makassar pasar-pasar juga di tahun itu sudah cukup ramai dan menjual aneka kebutuhan masyarakat diantaranya yaitu pasar Cingirak yang merupakan pasar paling ramai ketika itu di Makassar terdapat di kampung Cangirak, di bagian utara *passarstraat* di sini banyak diperjualbelikan barang-barang mewah dari luar negeri yang dibawa kapal-kapal dagang. Letaknya berdekatan dengan pelabuhan, Pasar Butung terletak di Kampung Butung, Pasar

terletak di Kampung Bontoala, dan Pasar Kalimbu yang terletak di



Mattulada, *Sejarah Masyarakat*, 409.

Kampung Tompobalang di sisi timur *SS-weg*. Selain itu juga terdapat pasar di beberapa kampung yang fungsi utamanya untuk melayani keperluan sehari-hari penduduk yang diam di sekitarnya, yaitu Pasar Mariso di Kampung Mariso, Pasar Sambungjawa di Kampung Sambungjawa, Pasar Ujung Tanah di Kampung Ujung Tanah, Pasar layang di Kampung Layang, Pasar Maricaya di Kampung Maricaya, Pasar Mamajang di Kampung Mamajang dan Pasar Beru di Kampung Beru.⁸²

Di *Pasarstraat* ada setidaknya 3 toko pakaian besar yakni Hotchand Kemchand, Bombay Moerah, dan Liberty. Nama-namanya mengindikasikan setidaknya dua dari tiga toko tersebut dimiliki oleh pedagang keturunan India. Sementara tidak jauh dari sana, di *Tempelstraat* dalam sebuah gedung indah ada toko pakaian dengan nama dalam bahasa Perancis Au Bon Marche. Terdapat juga toko dengan aksan Perancis, yang bernama Maison Femina namun membuka pintunya untuk dames maupun heeren. Terdapat juga toko hasil peternakan boerderij “Frisia” di *Goaweg* (sekarang Stadion Matoangin) yang menyediakan susu segar dari sapi Australia maupun sapi dari Frisland di ujung utara Negeri Belanda. Di tempat ini pemiliknya yang nampaknya keturunan Eropa Timur, U. Hudoffsky, juga menyediakan yoghurt Bulgaria asli dan juga mentega.⁸³

Kota Makassar di tahun 1930-an sudah dilayani dengan fasilitas kota yang baik. Dalam buku petunjuk untuk turis di tahun 1938, Makassar sudah dibanggakan sebagai “kota yang paling diterangi di Hindia Belanda”. Selain di kotanya sendiri, tenaga listrik juga tersedia di Sungguminasa, dan nantinya, menjelang tahun 1940



fuchlis Paeni dkk. *Sejarah Sosial*, 60.

Dias Pradadimara, “Penduduk Kota”, 4.

juga di semua kota di sekitar Makassar termasuk daerah tamasya Malino. Kota Makassar sebagai ibu kota di abad ke 20 adalah kota “baru” yang tumbuh bersamaan dengan semakin meningkatnya perekonomian di kota, di sekitar kota, di daerah-daerah di sebelah timur Sulawesi dan di Hindia secara keseluruhan dan bersamaan dengan melandanya kemodernan yang melanda daerah-daerah koloni.⁸⁴

Secara umum kedatangan Belanda telah berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Gaya hidup modern dan pembangunan segala fasilitas telah berdampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat kolonial. Modernitas dan perkotaan memberikan keuntungan dalam kehidupan. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses segala keperluan hidup baik itu kepentingan pemerintahan, pendidikan, kebutuhan sehari-hari maupun hiburan dan rekreasi. Selain itu, kedatangan bangsa Belanda atau Bangsa Eropa lainnya telah memberikan perubahan terhadap kebudayaan dan kebutuhan gaya hidup ataupun cara berpenampilan masyarakat lewat busana dan pelengkapannya.



Dias Pradadimara, "Penduduk Kota", 5

2.3 Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dari Tradisional ke Modern

Sistem perkawinan bagi masyarakat Sulawesi Selatan bukan hanya sekadar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud semakin mempereratinya. Di kalangan masyarakat biasa, perkawinan umumnya berlangsung antar keluarga dekat atau antar kelompok patronisasi yang sama. Perkawinan juga menjadi salah satu cara menambah pengikut dalam sistem patron-klien masyarakat. Bagi seorang bangsawan, pemilihan seorang istri harus pula mempertimbangkan keluarganya, dia mengawininya bukan semata-mata demi perempuan yang bersangkutan akan tetapi juga untuk menambah jumlah pengikut yang berasal dari sanak saudara sang istri serta para pengikut mereka. Meski kedua belah pihak berasal dari status sederajat, tetap harus ada satu pemimpin yang menduduki posisi yang relatif lebih kuat yang dapat dijadikan pemimpin dari para pemimpin. Jika keluarga sang istri berasal dari kalangan yang lebih rendah derajatnya, kehormatan yang diperoleh keluarga pihak istri pun lebih besar dalam kasus semacam itu perkawinan juga menjadi alat bagi seseorang untuk menaikkan status sosial keturunannya.⁸⁵

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan khususnya etnik Makassar, Bugis, dan Mandar perkawinan adalah tempat untuk mempertontonkan status mereka sehingga pesta perkawinan senantiasa dilaksanakan dengan mewah dengan memperhatikan segala aspek di dalamnya mulai dari penampilan tata busana, tata rias, hiasan dan



Christian Pelras, *Hubungan Patron-Klien*), 35.

ornamen juga para undangan, makanan dan sebagainya. Idealnya, perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri. Perkawinan antar sepupu, sepupu paralel (yaitu keduanya melalui sisi ibu atau melalui sisi bapak) ataupun sepupu silang yaitu dari sisi ibu dan satunya lagi dari sisi bapak . pernikahan antar sepupu satu kali dianggap terlalu panas sekali kalangan bangsawan tertinggi “darah putih“ yang mengalir dalam tubuh mereka harus dipelihara membuat mereka melakukan itu. Bagi kaum bangsawan, faktor lain yang harus diperhatikan yang paling penting adalah kesesuaian derajat antara pihak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan bangsawan laki-laki yang diperbolehkan kawin dengan pasangan berstatus lebih rendah, bangsawan perempuan sama sekali tidak memperbolehkan kawin dengan orang yang lebih rendah derajatnya. Semakin tinggi status kebangsawanan seseorang, semakin ketat pula aturan yang diberlakukan.⁸⁶

Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin atau mahar kepada perempuan. Takaran simbolis mahar yang diberikan juga ditentukan mengikuti garis keturunan. Takaran simbolis ini, disebut harga kedudukan (*sompa*), selalu dibayarkan dalam jumlah yang menurut ketentuan-ketentuan adat. Aturan lazim yang berlaku yakni seorang perempuan tidak boleh menerima *sompa* lebih rendah dari yang diterima ibunya, tetapi boleh menerima lebih dari yang diterima ibunya jika garis keturunan ayahnya lebih tinggi dari garis keturunan ibunya. Takaran selanjutnya, yaitu uang belanja (*dui manre'*), terdiri dari uang dalam



Christian Pelras, *Manusia Bugis*, 180.

jumlah yang lebih banyak. Penentuan jumlah uang belanja mencerminkan kedudukan yang dicapai orang tua pengantin Perempuan.⁸⁷

Dalam sistem perkawinan ini juga senantiasa menjunjung tinggi *siri* atau harga kedudukan. Salah satu perwujudan *siri* yang paling utama adalah keinginan untuk mempertahankan status kehormatan anggota keluarga dekatnya. Terdapat semacam ikatan *siri* yang tidak dapat dilanggar yang mengikat para anggota keluarga dan keluarga seorang Perempuan tentu akan dibuat *siri* jika Perempuan itu menikah kebawah.⁸⁸

Hal yang sama juga pada masyarakat Toraja *Tana* menentukan perkawinan seseorang, sebab menjadi patokan boleh tidaknya seseorang menikah. Sepasang calon pengantin dapat membatalkan perkawinan karena perbedaan *tana*. Sebelum perkawinan diselenggarakan, *tana* seseorang terlebih dahulu dipastikan. Jika *tana* masing-masing calon pengantin berbeda, maka timbul pertentangan dari pihak keluarga yang tergolong *tana* yang lebih tinggi. Contoh perempuan *tana* *bulaan* (bangsawan tinggi) yang menikah dengan laki-laki *tana* *karurung* (masyarakat biasa) sama sekali tidak dibenarkan, karena tidak sekasta dan menikahi laki-laki yang lebih dibawah. Namun perkawinan orang Toraja dilaksanakan lebih sederhana dari pesta kematian mereka.⁸⁹

Penyelenggaraan pesta perkawinan di Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa tahap dan berbeda-beda setiap etnik diantaranya: Bentuk perkawinan masyarakat



Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, 37.

Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, 38.

...T Tangdilintin. *Toraja Sebuah Penggalan*, 221.

Makassar terbagi atas 2 jenis yakni perkawinan dengan peminangan⁹⁰ dan perkawinan dengan *Annya'la*⁹¹. Upacara-upacara sebelum perkawinan yaitu *Mange Assuro* (pergi meminang), Upacara *appenai leko' lombo* (Upacara menaikkan daun/Siri besar), *a'barumbung* (Upacara mandi uap), *Akkorongtigi* (upacara membubuhi ramuan daun pacar pada kuku) setelah semua upacara tersebut dilakukan maka diadakanlah upacara perkawinan.⁹²

Upacara perkawinan pada Etnik Bugis senantiasa diselenggarakan secara meriah, dan dapat dikatakan bahwa upacara perkawinan inilah merupakan upacara yang paling meriah diselenggarakan dibanding dengan upacara-upacara lain dalam daur kehidupan seseorang. Tata Cara upacara adat Bugis dalam acara perkawinan memiliki beberapa proses atau tahapan adat, antara lain: 1) *A'jangan-jangan* (*Ma'manu'-manu'*); 2) *A'suro* (*Massuro*) atau melamar; 3) *A'pa'nassar* (*Patenre ada'*) atau menentukan hari; 4) *A'panai Leko' Lombo* (*erang-erang*) atau sirih pinang; 5) *A'barumbung* (*Mappesau*) atau mandi uap, dilakukan selama 3 (tiga) hari; 6) *Appassili bunting* (*Cemme mappesacing*) atau siraman dan *A'bubbu'* (mencukur rambut halus dari calon mempelai wanita); 7) *Mappacci* atau malam pacar; 8) *Mappettuada* atau akad nikah; 9) *Maparolla* atau ngunduh mantu; 9)

⁹⁰ Cara perkawinan dengan peminangan ini adalah suatu cara adat untuk menjamin terciptanya keluarga yang diterima umum dalam lingkungan keluarga maupun Masyarakat (St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara*,30)



Annya'la berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap an yang diwujudkan dengan kawin lari (St. Aminah Pabittei H, *Adat dan* 31)

St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara*, 38-48.

Appa' bajikang bunting atau menyatukan kedua mempelai. Dari tahapan tersebut, tahap kelima sampai tahap kesepuluh mempelai dalam keadaan bertata rias.⁹³

Di Mandar perkawinan yang selalu diidamkan oleh pihak keluarga pria yang hendak mencarikan jodoh anaknya adalah seorang wanita berikut seluruh keluarganya yang dapat bekerja sama, bantu-membantu baik yang bersifat spiritual yang menurut istilah dalam bahasa Mandar yakni dapat hidup *si rondo-rondo*, *siana-amasei* dan *sianaoppami*. Rangkaian upacara perkawinan etnik Mandar yakni 1) *Matanda jari* 'tanda jari' (meresmikan pinangan), 2) *Mappade manu mattujuang* (menanggung nafkah), 3) *Mampadai paccanring* (*maccanring*), 4) *Mappebissing*, 5) Mendirikan *Baruga*, 6) *Mappasau* (mandi uap), 7) *Mallolang*, 8) *Mallattigi* (pemberian daun pacar), 9) *Likka* (akad nikah), 10) *Mangino*, 11) *Marola*, 12) *Mottong sambengi/mottong manu* ', dan 12) Menziarahi kubur.⁹⁴

Bagi masyarakat Toraja perkawinan adalah salah satu bagian dari upacara *rambu tuka'* yang dalam istilah adat Toraja disebut dengan *aluk rampanan kapa'*. . Orang Toraja melestarikan dan menjadikan perkawinan sebagai tradisi yang bersifat religious yang memiliki nilai tersendiri dalam memulai suatu rumah tangga atau yang disebut dengan *tananan dapo'* (*tananan* yang berarti tanaman, menanam, membangun dan *dapo'* yang berarti dapur). Perkawinan adat Toraja terdiri dari 3 macam menurut tingkat kemegahannya. Tiga jenis tingkatan pernikahan adat tersebut, yaitu: 1) *Bo'bo' Bannang* (pernikahan sederhana). Pernikahan ini



Sumiani, Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar (*Jurnal Iya "Pakarena"*, 2016), 16.

St. Aminah Pabittei H, *Adat dan Upacara perkawinan*, 159.

diselenggarakan pada malam hari di rumah pengantin perempuan yang hanya menjamu pengantar pengantin laki-laki sebagai saksi pernikahan; 2) *Rampo Karoen* (pernikahan sore hari), yakni pernikahan taraf menengah yang diselenggarakan pada sore hari di rumah pengantin perempuan atau *tongkonan* pihak perempuan, atau *tongkonan* kedua belah pihak, sebagai tanda bahwa pernikahan tersebut masih tergolong keluarga; 3) *Rampo allo* yaitu level pernikahan adat Toraja yang tertinggi. Jenis upacara ini biasanya dilaksanakan oleh pihak pengantin yang berasal dari *tana' bulaan* (bangsawan tinggi) atau *tana' bassi* (bangsawan menengah) yang memiliki kemampuan yang cukup.

Tahapan peminangan orang Toraja terdiri dari 1) *Palingka Kada*, dimulai dengan mengirim utusan pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan sebagai langkah perkenalan untuk mengetahui apakah pihak pengantin perempuan tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Biasanya pada tahap *Unpalingka kada* tersebut disampaikan maksud melamar yang disebut *umbaa panggan* (menyampaikan sirih pinang); 2) *Umbaa Panggan* artinya mengantar sirih pinang yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang diantar sekurang-kurangnya 3 perempuan ke rumah orang tua calon pengantin perempuan dengan membawa sirih pinang yang dibungkus dengan pelepah daun pinang yang disebut *solong* jika lamaran diterima maka akan dilanjutkan ke tingkat pematangan acara persiapan *Rampo Allo*; 3) *Unrampanan Kapa'*, yakni hari pelaksanaan pernikahan; 4) *Dipandanni Langgan* atau *dinasuan*, yang berarti pernikahan yang sedang



ing ini kedua belah pihak sudah saling memberi makan pada rumah masing; 5) *Umpasule Barasang* yakni acara yang diselenggarakan setelah

pernikahan berlangsung tiga hari. Keluarga dari pihak perempuan (istri) melakukan acara balasan di rumah pihak laki-laki (suami) dengan mengantar makanan dalam *bakul* (*bakku' barasang*). Upacara pernikahan adat Toraja senantiasa didasari prinsip kesederhanaan, sehingga jarang ditemukan pernikahan yang tergolong mewah. Menurut ajaran adat seseorang yang baru melangsungkan pernikahan belum memiliki banyak harta sehingga harus hidup hemat dan sederhana. Aturan adat ini ditandai pula dengan tidak diperkenankan menyembelih kerbau, hanya babi atau ayam yang disajikan sebagai lauk pauk tanpa kurban persembahan.⁹⁵

Dengan berkuasanya bangsa Eropa yang membawa agama kristen mengakibatkan perubahan pada proses perkawinan masyarakat terutama yang telah menganut agama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Sebelum mengadakan resepsi di rumah pengantin terlebih dahulu kedua pengantin ke gereja untuk melaksanakan pemberkatan di gereja. Sekembalinya dari gereja, di depan rumah pengantin perempuan sudah ditaburkan bunga dan harum-haruman. Upacara perkawinan diakhiri dengan dansa dan makan minum.⁹⁶

Bagi masyarakat yang tidak menganut agama Kristen perubahan yang terjadi pada perkawinan mereka yakni mempercepat proses pelaksanaan ritus-ritus perkawinan yang awalnya bisa dilakukan selama seminggu atau lebih menjadi kurang lebih hanya 3 hari. Perubahan juga terletak pada penggunaan tata busana dan tata rias mereka. Mereka menggunakan seloyor atau gaun pengantin khas Eropa



..T.Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, (Toraja, Yayasan Lepongan ALBU), 1980), 239..

Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni Sampai Cetakan ke 2*, (Depok: Komunitas Bambu, 2014),126.

di acara setelah akad nikah dan setelah akan dilakukan acara di rumah mempelai laki-laki pengantin kembali menggunakan baju tradisional.⁹⁷



Wawancara dengan Halilintar Latief, Umur 84 Tahun. Tanggal 2
er 2024. Kedai Kita Jl. Landak Lama No.23, Mamajang Dalam, Kec.
g. Makassar